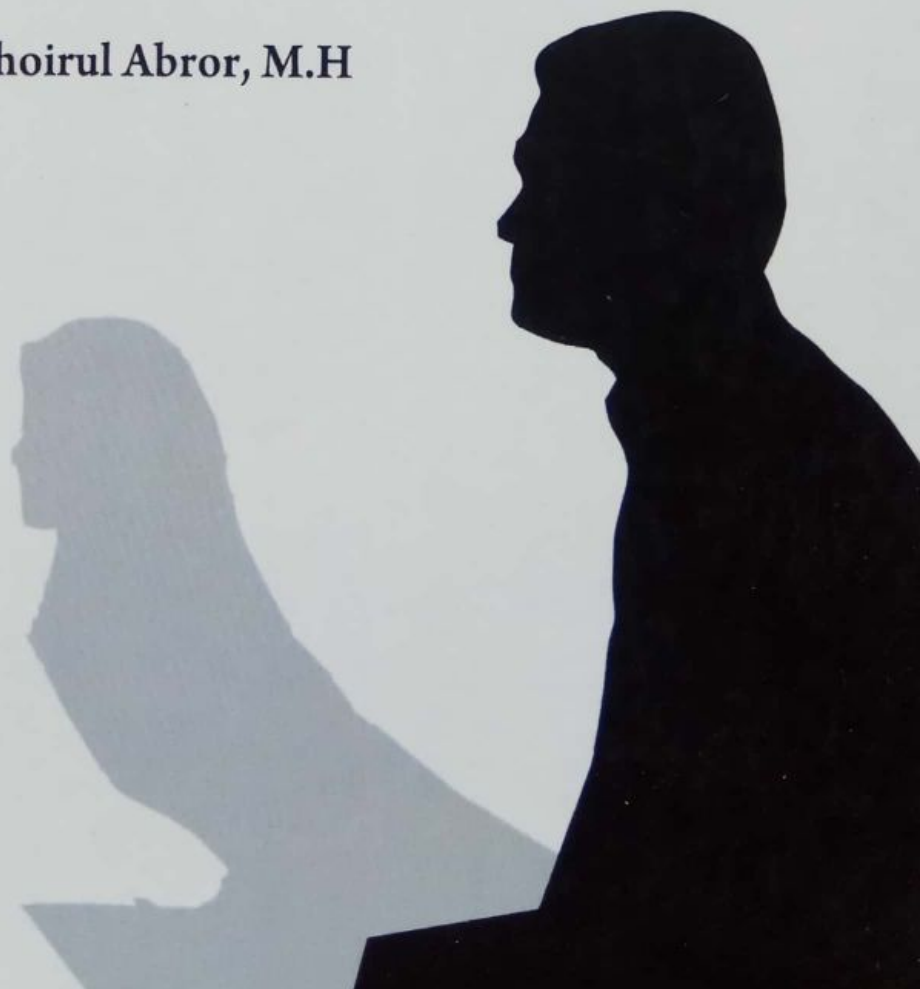




Laporan Hasil Penelitian Individu

PERKAWINAN KHUNSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Drs. H. Khoirul Abror, M.H





**PERKAWINAN KHUNSA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

LAPORAN HASIL PENELITIAN INDIVIDU

**Oleh :
Drs. H. Khoirul Abror, M.H**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
2015**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*
2. *Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

© Hak cipta pada pengarang

Dilarang mengutip sebagian atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa seizin penerbit, kecuali untuk kepentingan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Judul Buku : PERKAWINAN KHUNSA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penulis : Drs. H. Khoirul Abror, M.H

Cetakan : 2015

Pertama

Desain Cover : Permatanet

Layout oleh : Permatanet

Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
IAIN Raden Intan Lampung
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Kampus Sukarame
Telp. (0721) 780887 Bandar Lampung 35131

ISBN : 978-602-6910-17-2



**SAMBUTAN KETUA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015, yang dilaksanakan di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibiayai berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015.

Kami menyambut baik hasil Penelitian Individu yang dilaksanakan oleh saudara Drs. H. Khoirul Abror, M.H dengan judul **PERKAWINAN KHUNSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** yang dilakukan berdasarkan SK Rektor Nomor 72.a Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 Tentang Penetapan Judul Penelitian, Nama Peneliti, Pada Penelitian Individu Dosen IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015.

Kami berharap, semoga hasil penelitian ini dapat meningkatkan mutu hasil penelitian, menambah khazanah ilmu keislaman, dan berguna serta bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan yang berbasis iman, ilmu, dan akhlak mulia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Desember 2015
Ketua Lembaga Penelitian
Dan Pengabdian Kepada Masyarakat,

Prof. Dr. H. M. Nasor, M.Si.
NIP. 195707151987031003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SAMBUTAN KETUA LP2M	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
Bab I. PENDAHULUAN	1
Bab II. LANDASAN TEORI	35
Bab III. HUKUM PERKAWINAN KHUNSA	99
Bab IV. ANALISIS	123
BAB V. PENUTUP	139
DAFTAR PUSTAKA	143
BIOGRAFI PENULIS	155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt adalah, bahwa dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan Yang Maha Esa,¹ dan terciptanya kerukunan dalam rumah tangga yang (*sakinah, mawaddah warahmah*) merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga; Bahkan al-Qur'an memperoklaskan perkawinan sebagai suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci, paling kokoh antara suami isteri,² teguh dan kuat (*mi'saqan ghalizān*).³ Selain itu juga tujuan perkawinan, untuk

¹ Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama Semarang, Cet. I, 1993, h.

³ QS. Al-Ahzāb (33) : 7; QS. An-Nisā' (4): 21; QS. An-Nisā' (4) : 154; Lihat, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2; dan Lihat juga, Dedi Junaidi, *Bimbingan*

menghindarkan diri dari perbuatan zina, penerus keturunan (anak) dan juga bertujuan ibadah.⁴

Allah Swt telah menciptakan Nabi Adam dan Hawa sebagai cikal bakal manusia. Dari keduanya berkembang biak manusia lelaki dan perempuan dan semakin cepat berkembang manusia tersebut lantaran terjadi hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan sebagai suami isteri, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat dalam al-Quran, diantaranya:

1. QS. An-Nisâ (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ...

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. ...” (QS. An-Nisâ (4): 1)⁵

2. QS. An-Najm (53): 45

Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan al-Sunnah, Cet.1, Akademika Presindo, Jakarta, 2000, h. 14

⁴Taqiyyuddin Abi Bakr, *Kifayatul Akhyar fie Hilli Ghayah al-Ikhtishar*, Dar al-Kutub al-Islamy, tt, h. 48; Lihat, Khoiruddin nasution, *Hukum Perkawinan 1*, ACAdemia, & Tazzafa, Yogyakarta, 2005, h. 46-47.

⁵Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 99

3. وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasangan-pasangan pria dan wanita”. “Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan” (QS. An- najm, (53): 45) ⁶

3. QS. Al-Hujurât (49): 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan”

Ayat di atas, dan masih ada ayat lainnya, menegaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan berikut kelengkapan dan tanda-tandanya sebagai laki-laki dan perempuan; ini berarti bahwa manusia di dunia ini hanya terdiri dari dua jenis saja, yakni laki-laki dan perempuan, dan tidak ada jenis kelamin lainnya. Namun sejarah mencatat dan fakta berbicara bahwa ternyata ada sekelompok orang yang sangat kecil jumlahnya, ditemukan seseorang yang tidak mempunyai

⁶. *Ibid*, h, 766

status yang jelas, bukan laki-laki dan bukan perempuan, mereka itu adalah makhluk Allah yang disebut dengan *khunsa*.

Mengingat semakin maraknya wacana tentang *khunsa* sekarang ini, kiranya perlu penelitian khusus mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan *khunsa*, termasuk status hukum dan solusinya dalam hal menentukan kebolehan atau ketidakbolehannya dalam pernikahan.

Dalam hal menentukan identitas kelamin *khunsa*, para imam mazhab memiliki cara dan pandangan yang sama dalam menentukan kecenderungan ciri-ciri fisik seorang khunsa. Akan tetapi jika orang tersebut termasuk dalam *khunsa musykil* (sulit ditentukan kecenderungannya pada laki-laki atau perempuan), ulama berbeda pendapat mengenai bagian harta waris yang akan diterima oleh khunsa tersebut. Inilah beberapa hal yang akan dibahas nanti dalam tulisan ini.

Waria (*khunsa*) secara leksikal dan teknikal fikih memiliki dua contoh: Contoh pertama, orang-orang yang memiliki dua alat reproduksi pria dan wanita. Contoh kedua, orang-orang yang tidak memiliki dua alat reproduksi (biasanya sebagian orang ini) disebut

sebagai *mamsuh*.⁷ Untuk menentukan jenis kelamin ganda ini, banyak kriteria dan standar yang diusulkan oleh para dokter dan psikolog. Sebagian dari kriteria dan standar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi kromosom seseorang.
2. Kriteria hormon-hormon pria atau wanita
3. Faktor psikologis dan mental
4. Alat-alat reproduksi

Apa yang mengemuka dalam fikih Islam dan menjadi konsensus para jurus Syiah adalah kriteria keempat. Sejatinya jenis kelamin ditentukan dan berdasarkan alat-alat reproduksi yang dimiliki setiap orang. Karena itu, tanda-tanda untuk menentukan jenis kelamin ganda (waria) telah dijelaskan, lebih banyak menyangkut alat reproduksi.

Sebagai contoh, apabila seseorang memiliki dua alat reproduksi dan hanya salah satu yang digunakan untuk buang air kecil maka yang dijadikan kriteria adalah yang digunakan untuk

⁷ Ali Misykini, *Mushthalahât al-Fiqh*, h. 232; Muhammad Husain, Mukhtari, Muradi, Ali Asghar, *Farhang-e Ishthilahât-e Fiqh*, h. 77; Georges, *Mu'jam al-Mushthalahât al-Fiqhiyah wa al-Qânuniyah*, h. 154; Imam Khomeini, *Tahrir al-Wasilah*, jil. 2, h. 399, *Kitâb al-Irts*; Ali Akbar Dekhada, jil. 7, h. 9977; Sayid Muhammad Husaini, *Farhangge Lughat wa Ishthilahât-e Fiqhi*, h. 208.

buang air kecil. Oleh karena itu, apabila ia buang air kecil dengan menggunakan alat reproduksi pria maka ia dianggap sebagai pria dan hukum-hukum pria dikenakan kepadanya. Apabila ia buang air kecil dengan menggunakan alat reproduksi wanita maka ia dihukumi sebagai wanita. Akan tetapi kriteria mental-psikologis boleh jadi dapat dijadikan sebagai faktor sekunder.⁸ Dalam Fikih Islam, terdapat beragam jalan untuk menentukan dan mengidentifikasi jenis kelamin waria. Semua yang Allah ciptakan, pasti mengandung sebuah hikmah dan pelajaran bagi hamba-hambanya, bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan maha mampu berbuat yang dikehendaknya.

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٨٢

“Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah!" maka jadilah sesuatu itu” (QS. Yâsîn: (36): 82)⁹

Diantara sekian tanda kebesaran Allah tersebut adalah adanya sebagian dari hamba-hambanya yang terlahir dalam keadaan tidak diketahui jenis *kelaminnya* seperti tersebut di atas,

⁸ Mahdi Hadawi Tehrani, *Majmu'e Maqâlât-e wa Guftâr-e, Duwwumin Seminar Didgâh-ha-ye Islâm dar Pezesyk*, jil. 2, h. 80-81.

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, PT. Tehazed, 2010, h. 572. (QS. Yâsîn: (36): 82)

karena mereka terlahir dalam keadaan fisik khusus. Dan keadaan ini di dalam kitab fiqh disebut dengan istilah *khunsa*.

Dalam kitab *Syarah Kasyifatussaja Ala Safinatun-naja Fi Usuliddin Wal-Fiqh* karangan As-Syekh Al-Imam Al-Fadhil Abi Abdi Al-Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi, menyebutkan bahwa keadaan seseorang yang dikatakan *khunsa* sebagai berikut: ¹⁰

1. Insan tersebut memiliki dua alat kelamin sekaligus *penis* dan *vagina*;
2. Insan tersebut satu organ pembuangan, keluar darinya kencing dan kotoran dan dia tidak memiliki alat *kelamin* pria maupun wanita;
3. Insan tersebut memiliki *dubur* terpisah, dan kencingnya keluar tidak dari *penis* maupun *vagina*, akan tetapi keluar merembes atau menetes seperti keringat;
4. Insan tersebut tidak punya *dubur*, *penis* atau *vagina*, karenanya setiap yang dimakan akan keluar dalam bentuk muntahan atau diserap tubuh.

Seorang insan dengan salah satu empat keadaan ini, disebut *khunsa*, karena tidak adanya kejelasan tentang kelaminnya,

¹⁰Imam Al-Fadhil Abi Abdi Al-Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Syarah Kasyifatussaja Ala Safinatun-naja Fi Usuliddin Wal-Fiqh*, Pustaka Islamiah Indonesia, h. 89,

apakah dia seorang pria atau wanita. Dalam menetapkan status *khunsa* serta hukum-hukum yang akan diberlakukan terhadapnya terutama masalah perkawinannya diperlukan kajian yang mendalam, apabila salah menetapkan status *khunsa* tersebut, maka akan salah pulalah hukum yang diberlakukan terhadapnya, karena bisa jadi *khunsa* tersebut diberi hukum sama dengan hukumnya lelaki, tetapi ternyata dia adalah perempuan, begitupun sebaliknya, dia sudah di beri hukum sama dengan hukumnya perempuan, akan tetapi dia adalah laki-laki, dan ini akan menimbulkan hukum yang salah kaprah.

Untuk menetapkan hukum yang sah dan benar bagi *khunsa* ini, maka harus diteliti secara benar dan harus sesuai dengan hukum *syar'i*, karena hal ini akan menentukan sah dan tidaknya sebuah hukum perkawinannya serta hukum yang lainnya. Dalam sebuah perkawinan, apabila perkawinan itu ingin dikatakan sebagai perkawinan yang sah, maka haruslah memenuhi syarat dan *rukun* perkawinan menurut Islam, sedangkan *khunsa* statusnya belum jelas, apakah dia laki-laki atau perempuan. Untuk itu, maka diperlukan penelitian terlebih dahulu tentang jenis kelaminnya sebelum *khunsa* melakukan akad nikah, supaya perkawinannya *khunsa* bisa dihukumi sah menurut Islam.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalahnya, sebagai berikut:

1. Bagaimana metode yang ditempuh oleh para Fuqaha dalam menentukan status kelamin *khunsa* ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dalam menyikapi dan menentukan hukum perkawinan *khunsa* ?

C. Tinjauan Pustaka

Teori merupakan salah satu bagian yang memegang peranan penting dalam suatu penelitian, karena teori yang digunakan dalam penelitian, dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang diteliti secara sistematis. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan pandangan Hukum Islam dalam menyikapi dan menentukan hukum perkawinan *khunsa*, serta metode yang ditempuh oleh para Fqaha dalam menentukan status kelamin *khunsa*.

Untuk mendapatkan gambaran dalam penelitian ini, ada beberapa teori yang dipandang layak ditetapkan sebagai *grand teori* yang digunakan, antara lain:

1. Teori *Maqâşid Syarî'ah*. Secara bahasa *Maqâşid Syarî'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqâşid* dan *Syarî'ah*. *Maqâşid* berarti kesengajaan atau tujuan. *Maqâşid* merupakan

bentuk jama' dari *maqşūd*, yang berasal dari suku kata *Qaşada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqâşid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.¹¹ Sedangkan *Syari'ah* secara bahasa berarti artinya *المواضع تحضر الى الماء*¹² jalan menuju sumber air, dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.¹³ Menurut istilah, Al-Syatibi menyatakan, "Sesungguhnya *syari'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia ini dan akhirat"¹⁴

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa, tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutny, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam.¹⁵ Hal senada juga dikemukakan oleh al-Syatibi, yang menegaskan bahwa semua kewajiban

¹¹Ahmad Qorib, *Uşul Fikih 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet. II), h. 170.

¹²Dikutip oleh Asafri Jaya dalam kitab *lisân al-'Arab* kepunyaan Ibnu Mansur al-Afriqi, (Bairut: Dâr al-Sadr, t.th), VIII, h. 175

¹³Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 140.

¹⁴ Al-Syatibi, *al-Muwafaqât fie Uşûl al-Syari'ah*. (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), jilid 2, h. 374.

¹⁵Ibn Qayyim, *I'lam al-Muaqi'in Rabb al- 'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jayl, t.t.), Jilid III h. 3; lihat juga Izzuddin Ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Bairut: Dar al-Jail, t.t), jilid II, h. 72; Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, h. 1017.

diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif mâ lâ yustaṭī'* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).¹⁶ Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut dalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima misi (*Maqâṣid al-Syarī'ah/Maqâṣid al-Khamsah*) dimaksud adalah memelihara *agama, jiwa, akal, keturunan dan harta*.¹⁷

Dapat dipahami bahwa teori *Maqâṣid al-Syarī'ah*, dalam hukum Islam, sebagaimana di^{syari'}atkan oleh Allah dengan tujuan utama: merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu

¹⁶ Al- Syatiby, *al-Muafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 150. lebih lanjut tentang tujuan hukum Islam dapat dilihat dalam *Fathi al-daraini, al-manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihadi bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadist, 1975), h. 28; Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958), h. 366; Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad; Islamic Research Institute, 1977), h. 223.

¹⁷ Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 20

maupun masyarakat.¹⁸ Seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan atau (*needs*).¹⁹

Al Buthi mengatakan bahwa kata *maṣlahah* sama dengan kata manfaat dari sisi *wazan* (timbangan) dan makna. Dan setiap apapun yang mengandung manfaat, berupa mendatangkan faedah dan kenikmatan atau berupa perlindungan seperti menjauhkan dari bahaya atau rasa sakit, semua itu pantas disebut dengan *maṣlahah*²⁰

Yusuf Hamid mengatakan bahwa kata *maṣlahah* mutlak kembali kepada 2 hal:²¹

- a. Makna *hakiki*; Sebagaimana Al Buthi bahwa kata *maṣlahah* sama dengan kata manfaat (dalam bahasa arab), dari sisi *wazan* (timbangan) dan makna, ini adalah makna *hakiki*;

¹⁸Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet.2, Penamadani, Jakarta, 2005, h. 19

¹⁹M. Fahim Khan, *Shatibi's Objectives of Shari'ah and Some Implications for Consumer Theory*, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed), *Reading in Islamic Economic Thought*. h. 193.

²⁰Muhammad Said Romdhon Al Buthi, *Ḍawābitu al Maṣlahah fī al-Syariah al-Islamiyah*, (Muassasah Risalah), h. 23; Lihat juga, Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, (Kairo: Darul Ma'arif), h. 2479-2480

²¹Lihat, Yusuf Hamid Alim, *Al Maqāsid al 'Ammah Lie as-Syariah al-Islamiyah*, (Riyadh: Ma'had Ali Al Fikri Al Islami, Cet-2, 1994 M/1415 H), h. 133-134

- b. Makna *Majâzi*; Secara *majazi*, berarti perbuatan yang mengandung kebaikan dan manfaat, maksudnya dalam konteks *kausalitas*. Seperti halnya perniagaan yang mengandung manfaat materi dan menuntut ilmu yang mengandung manfaat maknawi.

Kemaslahatan inilah, dalam pandangan al-Syatibi, menjadi *Maqâsid al-Syari'ah*. Dengan kata lain, penetapan *syari'at*, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafşilan*), didasarkan pada suatu '*illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.²²

Menurut *syara'*, para *Ushuliyyun* membagi *maşlahah mursalah* (dilihat dari segi kandungannya) menjadi dua pengertian:

- a. *Maşlahah 'Ammah*; *Maslahat* ini mengacu kepada tujuan pensyari'atan, yakni untuk kemaslahatan (bersifat umum), yang dimaksud disini adalah sesuatu yang membawa kenikmatan atau yang mengarah kepada kenikmatan (jiwa

²²Muhammad 'Iz ad-Din Abdul Aziz bin Abd as-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fie Maşalih al-Anam*, Juz 1, t.t.p.,: al-Istiqomah, t.t., h. 12, didalam kitab ini dijelaskan pembagian *maşlahah* kepada hakiki dan majazi, hakiki bermakna kelezatan/kenikmatan sementara majazi bermakna sebab-sebab adanya kenikmatan/kelezatan tersebut. Lihat pula Abd. Rahman bin Ahmad al-lji, *Syarah al-'Adhl ala Mukhtashar al-Muntaha*, Juz 2, ttp. al-Amiriyah, tt, h. 239

dan raga, duniawi dan *ukhrawi*), dalam hal ini lawan katanya adalah kerusakan (*mafsadat*);

- b. *Maṣlahat Khaṣṣah*; yakni kemaslahatan yang bersifat khusus (bersifat pribadi), dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh* karena suaminya dinyatakan hilang. Menurut Kamaluddin Imam, sifat kekhususan dalam *maṣlahah* ini bergantung kepada prakteknya, hakikatnya *fasakh* nikah dalam kondisi seperti ini adalah umum diantara istri yang suaminya hilang.²³

Pengertian pertama ini tidak jauh berbeda dengan pengertian *maṣlahah* dari segi bahasa. Bila disimpulkan, mengandung arti sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.²⁴ Meskipun diakui bahwa *Maṣlahah* atau *istiṣlah* merupakan salah satu dari tertib sumber hukum yang *kehujahannya* masih

²³ Muhammad Kamaluddin Imam, *Uṣulul Fiqh Al-Islamy*, (Iskandariyah: Darul Matnu'at Al Jami'ah, h. 201-202

²⁴ Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2011, h. 325. Bandingkan, M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, h. 186

diperselisihkan oleh ulama fiqh. Kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi'iyah²⁵ dan Hanafiah tidak mengakui *maṣlahah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum.²⁶

Menurut hukum Islam, bahwa tujuan *syari'at* Islam (*maqâṣid syarî'ah*) adalah mendatangkan *maṣlahah* dan menghindarkan bahaya, karena perceraian sangat dimungkinkan menimbulkan *muḍarat* kepada suami, istri, anak, dan harta bersama (*gono gini*), maka perceraian, oleh pemerintah dapat dipandang sebagai masalah *ḍarurat* karena tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadîs. Hukum yang diterapkan berdasarkan *ijtihad* ini

²⁵Moh. Mukri, dalam bukunya *Benarkah Imam Syafi'i Menolak Masalah?* Memberikan bukti bahwa meskipun kalangan ulama yang secara teoritis menolak konsep masalah, ternyata pemikiran fikihnya membuktikan hal yang sebaliknya, yaitu menggunakan pertimbangan-pertimbangan masalah dalam bidang ijtihad mereka. Ulama Syafi'iyah misalnya memandang boleh membedah perut seorang ibu yang sudah meninggal dengan tujuan mengeluarkan janin yang ada di dalamnya, apabila diduga kuat bahwa janin itu akan keluar dalam keadaan hidup, meskipun menurut syara' terdapat larangan mengganggu mayat. Bahkan ada ulama Syafi'iyah, sebagaimana beliau mengutip pendapat Yusuf Qardawi, yang memandang wajib melakukan pembedahan mayat dalam keadaan demikian karena hal itu merupakan upaya menyelamatkan orang hidup dengan menghilangkan bagian dari mayat seseorang. Lihat Moh. Mukri, *Benarkah Imam Syafi'i Menolak Masalah?*, Yogyakarta: Pesantren Nawaesea Press, 2010, h. 9-10

²⁶Satria Effendi, M. Zein, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kecana, 2009, h. 150-151. Lihat pula Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 141

dapat berubah sesuai kondisi, selama perubahan hukum itu untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, atau *maqâṣid al-syarî'ah* berdasarkan kaidah fiqhiyah.²⁷

تغير الاحكام بتغير الاحوال والأزمنة

“Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman”²⁸.

Diantara kaidah fikih yang juga bisa dijadikan dasar adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maṣlahah*)”.²⁹

Menurut Abdul Manan,³⁰ ada beberapa faktor yang menjadi alat atau faktor pengubah hukum, yaitu faktor arus *globalisasi*, faktor sosial budaya, faktor politik, faktor

²⁷Huzaemah Tahido Yanggo, *Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam*, Jakarta GT2 dan GG Pas, h. 22.

²⁸Menurut Syamsul Anwar, mengemukakan bahwa ada 4 (empat) syarat hukum dapat berubah: 1) Bila ada tuntutan untuk berubah; 2) Tidak menyangkut ibadah mahdah (ibadah pokok); 3) Hukum itu tidak bersifat Qaṭ'i tapi bersifat zanni; 4) ada landasan syar'inya.

²⁹Jalaluddin as-Suyuṭi, *al-Asybah wa an-Nazāir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), h. 176.

³⁰Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005, h. 57.

ekonomi, faktor iptek, pendidikan, hukum, dan supremasi hukum.

Ada pula yang menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai landasan berpendapat. Teori ini mengajarkan bahwa: “Apa yang tidak diperintahkan secara *eksplisit* dalam Al-Qur’an dan Al Hadiś dapat dibuat aturan yang mengharuskan berdasarkan *kemaslahatan* dan sekaligus menghindari *muḍarat*. Berdasarkan cara berfikir ini, pencatatan perkawinan dapat diwajibkan demi menjaga *kemaslahatan* suami, istri, dan anak-anaknya,”³¹ karena dinilai bahwa perkawinan yang tidak tercatat lebih banyak mendatangkan *muḍarat* daripada manfaatnya.

2. Teori kebutuhan sebagaimana yang diungkap oleh Abraham Maslow. Menurut Maslow, kebutuhan digambarkan sebagai sebuah *hierarki* atau tangga yang menggambarkan tingkat kebutuhan.³² Kebutuhan-kebutuhan yang dikemukakan oleh

³¹Fathurrahman Djamil, *Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuennya Terhadap Anak dan Harta*, Jakarta, GT2 dan GG Pas, Mei 2007, h. 38.

³²Jess; Gregory J. Feist (2010). *Teori Kepribadian: Theories of Personality*. [Salemba Humanika](#). h. 331.

Maslow tersebut dapat diaplikasikan kepada lima tingkat kebutuhan, sebagai berikut: ³³

- a. Pemenuhan kebutuhan “*fisiologis*” antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian upah atau gaji yang adil dan lingkungan kerja yang nyaman;
- b. Pemenuhan kebutuhan “rasa aman” antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian tunjangan, keamanan kerja dan lingkungan kerja yang aman;
- c. Pemenuhan kebutuhan “rasa memiliki dan kasih sayang” antara lain dapat diaplikasikan dalam hal dorongan terhadap kerja sama, *stabilitas* kelompok dan kesempatan *berinteraksisocial*;
- d. Pemenuhan kebutuhan akan “penghargaan”, dapat diaplikasikan dalam hal penghormatan terhadap jenis pekerjaan, *signifikansiaktivitas* pekerjaan dan pengakuan *public* terhadap *performance* yang baik;
- e. Pemenuhan kebutuhan “*aktualisasi diri*” antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pilihan dalam *berkreativitas* dan tantangan pekerjaan.

³³ James H. Donnelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, *Fundamentals of Management*, (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998). h. 274

Maslow memberi *hipotesis* bahwa setelah *individu* memuaskan kebutuhan pada tingkat paling bawah, *individu* akan memuaskan kebutuhan pada tingkat yang berikutnya. Jika pada tingkat tertinggi tetapi kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka *individu* dapat kembali pada tingkat kebutuhan yang sebelumnya. Kebutuhan yang belum terpenuhi merupakan kunci utama dalam suatu proses *motivasi*, seorang *individu* akan terdorong untuk berperilaku bila terdapat suatu kekurangan dalam dirinya, baik secara *psikis*, maupun *psikologis*. *Motivasi* itu sendiri meliputi usaha, ketekunan dan tujuan.³⁴

Bila ditelaah lebih dalam, berbagai tingkat kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow diatas, sepenuhnya telah terakomodasi dalam konsep *maqâşidal-syarî'ah*. Bahkan, konsep yang telah dikemukakan oleh Al-Syatibi mempunyai keunggulan *komparatif* yang sangat *signifikan*, yakni menempatkan agama sebagai faktor utama dalam *elemen* kebutuhan dasar manusia; satu hal yang luput dari perhatian Maslow, seperti yang telah dimaklumi bersama, agama

³⁴ James H. Donnelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, *Fundamentals of Management*, (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998). h. 268

merupakan *fitrah* manusia dan menjadi faktor penentu dalam mengarahkan kehidupan umat manusia di dunia ini.

Dalam *perspektif* Islam, berpijak pada *doktrin* keagamaan yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam rangka memperoleh *kemaslahatan* di dunia dan di akhirat merupakan bagian dari kewajiban agama, manusia akan termotivasi untuk selalu berkreasi dan bekerja keras. Hal ini, pada akhirnya, tentu akan meningkatkan *produktivitas* kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan..

3. Teori Kebijakan Penegakan Hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief ³⁵ Bahwa nilai kepercayaan merupakan salah satu nilai atau kepentingan masyarakat yang perlu selalu dipelihara, ditegakkan dan dilindungi. Masyarakat yang aman, tertib dan damai diharapkan dapat dicapai apabila ada “saling kepercayaan” dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai kepercayaan inilah yang justeru menjalin hubungan harmonis kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya akan timbul kekacauan, ketidaktenteraman dan ketidakdamaian apabila

³⁵Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, bandung, 1998, h. 6

nilai kepercayaan telah hilang, atau mengalami *erosi* dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah tentu ada maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, mengungkap dan menganalisis serta menemukan: Bagaimana pandangan Hukum Islam dalam menyikapi hukum perkawinan *khunsa* .
- b. Untuk mengetahui, menemukan, menjelaskan, dan menganalisis serta merumuskan cara ataupun metoda yang ditempuh oleh para Fuqaha dalam menentukan status kelamin *khunsa* yang ada.

E. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai kontribusi untuk:

1. Menambah khazanah ilmiah dibidang hukum, baik yang berkaitan dengan hukum *meteriel* maupun hukum *formil*, lebih khusus lagi dalam bidang hukum Islam; terutama yang terkait erat dengan hukum perkawinan bagi *khunsa*;
2. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bermanfaat serta menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi pembuat dan penegak hukum yang menjalankan undang-

undang, serta para pihak yang berkait erat dengan petugas pencatat nikah (PPN), terutama bagi calon pasangan suami isteri (*khunsa*) yang berkehendak untuk menjalankan bahtera rumah tangga.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, atau prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, oleh karenanya metode penelitian menurut Iqbal Hasan,³⁶ dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian dan membicarakan urutan kerja dan teknik penelitian, membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dapat juga *research* ini diartikan sebagai suatu cara untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran dengan ciri *objectivitas*, karena kebenaran yang diperoleh secara *konseptual* atau *deduktif* saja tidaklah cukup, tetapi harus diuji secara *empiris*.³⁷

³⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 21

³⁷ Lihat, Sedarmayanti dan Syarif Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung, 2002, h. 27

Mencermati maksud dari penelitian tersebut, dapat dipahami, bahwa penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun, untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir, yakni secara *empiris* atau melalui pengalaman. Oleh karenanya untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkanlah antara metode pendekatan *rasional* dan metode pendekatan *empiris*. *Rasionalisme* memberikan kerangka pemikiran yang *logis*, sedangkan *empirisme* memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran (mengkaji hukum sebagai pola perilaku).³⁸

Pembahasan dalam *desain* penelitian ini, meliputi beberapa hal, yaitu jenis dan sifat penelitian dan pendekatan masalah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian *kualitatif* yaitu penelitian atau *inkuirinaturalistik* atau alamiah, permasalahannya bersifat umum dan terbuka.³⁹ Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu mengadakan

³⁸ Bandingkan, Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, h. 128

³⁹ Alinis Ilyas, *Metodologi Penelitian*, Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung, 2003, h.5

penelitian dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan-bahan dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dan mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Jenis penelitian kualitatif adalah normatif empiris (*applied law research*) yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan (undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁰

2. Sifat Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat “*deskriptif normatif*” yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi obyek⁴¹ atau untuk mengumpulkan *informasi* mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan,⁴² tentang apa dan bagaimana cara menentukan seseorang itu disebut *khunsa* pria/wanita dan bagaimana hukum menentukan perkawinan perkawinan

⁴⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 132

⁴¹. Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1981, h. 29

⁴²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2005, h. 234

khunsa.atau penelitian hukum mengenai pemberlakuanimplementasi ketentuan hukum *normatif* secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi ditengah masyarakat.⁴³

Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari kepustakaan (*library research*).*Library Research* atau studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.⁴⁴ Penelitian *Library Research* dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur seperti al-Qur'an, Hadis, buku-buku Fikih dan Undang-undang serta literatur lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Tujuan dari *libreary Research* ini untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat dalam kepustakaan, misalnya berupa buku, majallah, jurnal dan atau naskah dan dokumen-dokumen lainnya.⁴⁵

⁴³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004., h. 68

⁴⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 50

⁴⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 33

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dan *yuridis empiris* (sosiologis). Melalui pendekatan *normatif*, akan disoroti ketentuan yang berkaitan dengan aspek jenis kelamin calon yang akan melangsungkan perkawinan, *khunsa* atau bukan, dan untuk meneliti atau mengidentifikasi aturan-aturan yang berlaku, apakah sesuai dengan penerapannya di lapangan.⁴⁶ Pendekatan sosiologis ini didasarkan pada Pandangan *positivistik* yang berpegang teguh pada teori *korespondensi* tentang kebenaran.⁴⁷ Oleh karenanya penelitian ini difokuskan untuk mencari data dan informasi tentang bagaimana metoda penentuan *khunsa* dan bagaimana hukum yang ditetapkan terhadap perkawinan *khunsa*.

4. Sumber Data

Perlu ditegaskan bahwa data adalah d skripsi dari suatu kejadian yang dihadapi. Kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata, data merupakan bentuk yang belum dapat memberi manfaat besar bagi penerimanya, karenanya

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 12

⁴⁷ Bruggink, J.J.H. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*. Alih Bahasa oleh B. Arief Sidharta. Bandung : Citra Aditya Bakti. h. 185.

diperlukan suatu proses pengolahan sehingga bisa memberikan suatu informasi yang berguna bagi penerimanya.⁴⁸

Pengumpulan data, diperoleh dengan menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah: sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.⁴⁹ Sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Al-Hadis, Kitab Fikih, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan *khunsa* sebagai bahan untuk diteliti, yang diharapkan dapat memberikan gambaran untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan diteliti.

b. Data Skunder

Sumber data skunder merupakan sekumpulan data yang akan menopang data primer yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yakni data yang didapatkan melalui teori dan pendapat para ahli hukum. Penelitian diperoleh dari buku-buku fikih yang berhubungan

⁴⁸ [http://b.domaindlx.com/./data informasi.htm](http://b.domaindlx.com/./data%20informasi.htm), diakses 20 Oktober 2014

⁴⁹. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Sumbangsih, Yogyakarta, 1974, h. 2

dengan obyek penelitian. antara lain buku-buku⁵⁰ yang bersifat klasik maupun kontemporer; bahkan menurut Iskandar, termasuk juga kedalam kategori yang diperoleh melalui pengumpulan data yang bersifat studi dokumentasi yang berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, *referensi-referensi*, atau peraturan (*literature* laporan, tulisan, dan lainnya yang memiliki relevansinya dengan fokus permasalahan penelitian.⁵¹ Selain itu, juga menganalisa masalah-masalah *teoritis yuridis*, dan mengumpulkan pendapat para ahli dibidang hukum, khususnya yang menyangkut cara dan penetapan hukum perkawinan *khunsa*.

Penelitian Kepustakaan; yaitu data yang didapatkan melalui teori dan pendapat para ahli hukum Islam (*fuqaha*), diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian. Selain itu, juga menganalisa masalah-masalah *teoritis yuridis*, dan mengumpulkan pendapat para ahli dibidang hukum Islam, khususnya yang ada relevansinya dengan *khunsa*.

5. Metode Pengumpulan Data

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 30

⁵¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, Gaung Persada Press, 2008, h. 77

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dapat dikumpulkan melalui penelitian buku-buku fikih, al-qur'an dan al-Hadís, atau diperoleh dari sumber aslinya,⁵² dan data sekunder dapat diperoleh melalui penelitian kepustakaan, atau data yang diperoleh secara tidak langsung dengan aslinya.⁵³ Atau dapat diperoleh melalui penelusuran literatur dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan hukum sebagai pelengkap dan penyempurna, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum *primer*, yakni bahan hukum yang mengikat, misalnya: Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Al-qur'an, Kitab fikih maupun hadís yang ada relevansinya dengan perkawinan *khunsa*;
- b. Bahan hukum *sekunder* yang meliputi karya ilmiah para ahli hukum, hasil penelitian ilmiah, hasil seminar dan lain-lain;

⁵²Lihat, Louis Gootshalk, *Understanding Historya Primer of Historical Method*, terjemah: Nograho Noto Susanto, (Jakarta, UI Press, 1985), h. 32

⁵³Louis Gootshalk, *Understanding Historya Primer of Historical Method*, terjemah: Nograho Noto Susanto, (Jakarta, UI Press, 1985), h. 95

- c. Bahan hukum *tersier* yakni bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, kemudian langkah selanjutnya mengolah data yang masih mentah untuk menjadi data yang sistematis, sehingga dapat memberikan arti dan dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Dalam mengolah data, digunakan analisa *kualitatif* (*non* statistik), karena data yang diperoleh merupakan data *deskriptif*. Hal ini sependapat dengan Sumadi yang mengemukakan pendapatnya bahwa, penelitian harus memastikan pola analisa mana yang akan digunakannya. Apakah analisis statistik atau analisis *non* statistik. Pemilihan ini tergantung data yang terkumpul, statistik sesuai dengan data *kualitatif* atau dikualifikasikan dalam bentuk bilangan, sedangkan analisa *non* statistik sesuai data *deskriptif*.⁵⁴

⁵⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, CV. Rajawali, Jakarta, 1991, h. 39

Data yang diperoleh, di-*edit* untuk mencocokkan jawaban yang bervariasi dan selanjutnya dianalisis secara *kualitatif*, yakni akan menguraikan atau menjelaskan data yang diperoleh untuk menunjukkan bagaimana cara menentukan khunsa yang boleh menikah atau tidak, dan bagaimana menentukan hukum pernikahan bagi *khunsa*.

b. Penyajian Data

Display data atau penyajian data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Melalui penyajian data tersebut, maka terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Pada penelitian ini, secara teknis data-data yang telah diorganisir kedalam matriks analisis data, akan disajikan dalam bentuk teks *naratif*.

c. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara *kualitatif*.⁵⁵ Analisis data *kualitatif* adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang

⁵⁵ Analisis Kualitatif, artinya menguraikan data dalam bentuk yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis; Lihat, Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, h. 127

dinyatakan secara tertulis dan nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁵⁶ Dimaksud dengan analisis disini adalah, sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian, secara logis, sistematis, dan “mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian”.⁵⁷ Logis sistematis menunjukkan cara berfikir *deduktif-induktif* dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesa.⁵⁸

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai masalah yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir *deduktif*. Cara berfikir *deduktif* yaitu metode analisa data

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, h. 12; Lihat. Jiko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori & Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, h. 105

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung, 1989, h. 112

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Ibid*, h. 106

dengan cara bermula dari data yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁵⁹

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian *kualitatif* dapat bersifat sementara apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten dikala mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti berusaha untuk memahami, menganalisis, dan mencari makna dari kata yang dikumpulkan. Dan pada akhirnya setelah data terkumpul akan diperoleh suatu kesimpulan.

Konklusi atau kesimpulan dalam penelitian *kualitatif* tidak memerlukan angka-angka atau pengujian statistik untuk mendasari kesimpulan. Sebaliknya kesimpulan dalam penelitian *kualitatif* berbentuk *deskripsi kualitatif*, yang merupakan kristalisasi dan konseptual dari temuan lapangan.⁶⁰

⁵⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990, h. 28

⁶⁰ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Cet.I, STIA-LAN Press, Jakarta, 1999. h. 111

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh

Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁶¹ Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran; bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan.⁶² Sedangkan menurut istilah *syara'*, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal;⁶³ dan bisa juga diartikan menurut *syara'* ialah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ عَلَى لَصَحِيحٍ

“Akad yang menjadi perantara diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan kata nikah, *atautazwîj*, sedangkan nikah adalah makna hakikat

⁶¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, h. 6

⁶² Hafizh Dasuki, “dkk”, *Ensiklopedi Islam*, Cetakan Pertama, Jilid 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993, h. 32

⁶³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, penerjmh. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004, h. 3 ; Lihat, M. Quraisy Syihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.k6, Mizan, Bandung, 1997, h. 191

didalam akad dan bermakna *majazi* dalam *waṭ'i*, hal ini menurut *qaul* yang *ṣahih*".⁶⁴

Sayyid Sabiq dalam bukunya "*Fiqh Sunnah*" mendefinisikan nikah sebagai berikut:

الرَّوْجِيَّةُ سُنَّةٌ مِنْ سُنَّةِ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ وَالتَّكْوِينِ وَهِيَ عَامَةٌ
مُطَرَّدَةٌ لَا يَسُدُّ عَنْهَا عَالَمُ الْإِنْسَانِ أَوْ عَالَمُ الْحَيَوَانِ أَوْ عَالَمُ
النَّبَاتِ

"Perkawinan adalah salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan".⁶⁵

Keterangan tersebut, diperjelas dalam firman Allah QS. Az-Žâriyât,(51):49yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)".(QS. Adz-Dzariyat(51): 49)

⁶⁴. Fathul Mu'in Bisarkhi *Qurrotul 'Ain*, Bilma'na 'Ala Fesanteren, h. 97-

⁶⁵. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Dar Al-Fikr, Beirut Lebanon, h. 1

Kata nikah dalam al-Qur'an terkadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi terkadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual. Contoh menikah yang artinya akad nikah adalah firman Allah, QS. An-Nisâ' (4):

3

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ فَإِنَّ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

“Maka lakukanlah akad nikah dengan wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamumiliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.(QS. An-Nisa' (4): 3)

Contoh lain adalah firman Allah QS. An-Nisâ' (4): 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ
كَانَ فُحْشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (النِّسَاءُ: ٢٢)

“Dan janganlah kamu lakukan akad nikah dengan wanita-wanita yang telah melakukan akad nikah dengan ayahmu, terkecuali pada masa yang telah

lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh.”(QS. An-Nisâ’ (4): 22)

Kedua ayat di atas dipahami untuk mengurai dan mengartikan semata-mata untuk melaksanakan akad nikah (menikah), bukan berartial-*waṭ-u* atau *al-jimâ’u* (melakukan hubungan seksual). Sedangkan contoh menikah yang artinya melakukan hubungan seksual⁶⁶ (*al-waṭ-u* atau *al-jimâ’u*) adalah sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 230)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ ٢٣٠

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia melakukan hubungan seksual dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-

⁶⁶ M. Quraisy Syihab, *Wawasan al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.k6, Mizan, Bandung, 1997, h. 191

Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”(QS. Al-Baqarah (2): 230)

Arti nikah pada ayat ini dapat dipahami maksudnya sebagai *al-waṭ-u* atau *al-jimâ'u* (melakukan hubungan seksual), bukan dimaksudkan sebagai akad nikah. Seorang istri yang telah diceraikan suaminya yang pertama sebanyak tiga kali, dan sudah menikah dengan suami yang kedua, maka dia harus melakukan nikah (hubungan seksual) dengan suaminya yang kedua tersebut, kemudian diceraikannya, sebelum kembali kepada suaminya yang pertama. Jadi, senada dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Bagir,⁶⁷ bahwa melakukan nikah dengan suami yang kedua itu, tidak lain maksudnya adalah melakukan hubungan seksual.

Kedua makna nikah tersebut di atas, para Ulama berbeda pendapat dalam memahami makna yang *hakiki* dan makna yang *majâzi*. sbb:

Pendapat pertama (Maḏhab Syafi'iyah) yang *disahihkan* oleh Abu Thayib, Mutawali dan Qaḏi Husain: bahwa nikah

⁶⁷. Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqih Praktis Menurut Al-qur'an , As-sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Mizan, Bandung, Cetakan Pertama, 2002, h. 210

pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan terkadang dipakai secara *majâzi* untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat *ṣahih* dari madzhab Syafi'iyah,⁶⁸

Pendapat kedua (Mazhab Hanafiyah): mengemukakan bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang dipakai secara *majâzi* untuk menyebut akad nikah.⁶⁹

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama; Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak

⁶⁸. Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, h. 460

⁶⁹. Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibi Al-Arba'ah*, Darul Hadis Al-Qahira, Juz 4, h. 7

perempuan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.⁷⁰

Nikah (أَنْكَاحٌ) berarti menghimpun atau mengumpulkan. Yaitu salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi.⁷¹

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan

⁷⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, h. 7

⁷¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid 4, Pustaka Baru Van Hove, Jakarta, 1996, h. 1329

suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan *syara*”⁷².

Menurut Muhammad Abu Zahrah nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.⁷³

Ibnu Qudamah -*rahimahullaahu ta'ala*- mengatakan bahwa nikah menurut istilah *syar'i* adalah suatu akad perkawinan dan lafaz nikah secara mutlak mengandung pengertian tersebut selama tidak ada dalil yang merubahnya. Al-Qadhi berkata tentang adanya keserupaan dalam hakekat secara menyeluruh antara akad dan hubungan intim,⁷⁴ sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS An-Nisâ (4): 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ
كَانَ فُحْشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (النِّسَاءُ: ٢٢)

⁷² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid 4, Pustaka Baru Van Hove, Jakarta, 1996, h. 1329

⁷³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid 4, Pustaka Baru Van Hove, Jakarta, 1996, h. 1329

⁷⁴ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Kairo: Daar al-Hadis, 1425 H/2004 M), juz IX, h. 113.

“Dan janganlah kamu lakukan akad nikah dengan wanita-wanita yang telah melakukan akad nikah dengan ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh.”(QS. An-Nisâ’ (4): 22)⁷⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miiâqan ghalîẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁷⁶ Jadi, perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan

⁷⁵Dirjen Bimas Islam, Direktorat Uraisi dan Pembinaan Syari’ah, Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, PT. Tehazed, Jakarta, 2010, h. 105

⁷⁶Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Pengertian Perkawinan menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Menurut Hilman, tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun pihak suami.⁷⁷ Jadi, terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga

⁷⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977, h. 70

menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan dengan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat dunia dan akhirat.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut.

Al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Sebagaimana firman Allah Swt.QS. An-Nisâ' (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia!, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (*silaturrahim*). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisâ’ (4): 1)⁷⁸

Ditegaskan juga dalam QS. Ar-Rûm (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,

⁷⁸Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari’ah, Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 99

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rûm (30): 21)

Menurut para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *oksigen* dan *hydrogen*), listrik (positif dan negatif) dan sebagainya. Apa yang dinyatakan oleh para sarjana ilmu Alam tersebut sesuai dengan pernyataan Allah Swt sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an. QS. Az-Zâriyât (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

”Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Dasar hukum perkawinan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, yakni:

1) Menurut Al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (masih membujang) ⁷⁹ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nūr (24): 32

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ
اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

“Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang *batil* dan mengingkari nikmat Allah?”. QS. An-Nahl (16): 72

2) Menurut Hadis:

⁷⁹ Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin

Hadiś Rasulullah Saw dari Abdillah, yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.⁸⁰ (رواه البخاري)

”Dari ‘Abdillah bin Mas’ud berkata: Di zaman Rasulullah Saw, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memilki apa-apa. Rasulullah Saw berkata kepada kami, ‘Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.’” (H.R. Bukhari)⁸¹

Sebuah hadiś yang menunjukkan bahwa *Ijab* itu hak perempuan dan *Qabul* kewajiban laki-laki:

⁸⁰ Mushtofa Muhammad Imarah, *Jawahiru Al-Bukhari*, Al-Hidayah, Surabaya, 1371, h. 422.

⁸¹ Zainuddin Hamidy, dkk, *Shahih Bukhari, Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid IV, Widjaya, Jakarta, h. 8

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا أَوْلِيُّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ⁸²

“Wanita manapun yang tidak dinikahkan oleh walinya maka pernikahannya tidak sah, beliau mengucapkannya tiga kali. Jika telah melakukan hubungan badan, maka wanita itu tetap berhak menerima mahar (maskawin) karena hubungan badannya itu. Jika mereka berselisih maka pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (H.R. Ahmad)

Berdasarkan keterangan naş diatas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadiş. Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu asalnya *mubah*, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya, sbb:

a) Wajib

Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk

⁸²Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Bab La Nikah Illa Biwaliy, Juz V, Aplikasi Maktabah Syamilah, h. 486

menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah menikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan menikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

b) *Sunnah*(dianjurkan/ *az-zawaj al-mustahab*)

Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina; memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya

menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. dalam hal seperti ini maka menikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang semur hidup;

Sebagaimana didasarkan pada hadis Nabi Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّوْجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (أخرجه مسلم في كتاب النكاح)⁸³

“Dari Abdillah berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami, “hai para pemuda barang siapa diri kalian mampu untuk menikah, maka nikahlah, sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga farji (memelihara kehormatan/kemaluan); sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat

⁸³Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, tth), h. 593

menjadi penawar nafsu sahwat”. (diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Nikah).

c) Haram

Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi

dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya.⁸⁴

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyari'atkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan; sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Baqarah (2): 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...”

Selain keharaman tersebut di atas, Zakiah Daradjat⁸⁵ menambahkan haram pula hukumnya suatu pernikahan, apabila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan perempuannya, wanita yang dinikahi itu tidak

⁸⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Khitbah, Nikah, dan Talak), (Jakarta: Amzah, 2009) h. 45

⁸⁵Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* Jilid II, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 47

diurus, hanya bermaksud agar wanita itu tidak dapat menikah dengan laki-laki lain.

d) *Makruh*

Yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja isteri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah *syahwat*) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

c) *Mubah (ibâhah)*

Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan *ibâhah* inilah yang umum terjadi di tengah-tengah

masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama' dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.⁸⁶

Menurut Sayyid Sabiq, bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.⁸⁷

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan bagi orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan, bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum *mubah* ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan pengahambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan,

⁸⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 91-93

⁸⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, PT. Alma'arif, Bandung, 1980, h. 22-25.

mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.⁸⁸

Uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun, merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wuḍudan *takbîratu al-ihram* untuk shalat,⁸⁹ atau adanya calon pengantin laki-laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup

⁸⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 21

⁸⁹Abdul hamid Hakim, *Mabâdi' Awwaliyah*, juz I, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, h. 9

aurat dalam shalat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.⁹⁰

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana detegaskan oleh khoiruddin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun.⁹¹ Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi

⁹⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 45-46

⁹¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, ACAdeMIA, Yogyakarta, 2005, h. 29

- d. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. *Sighat* akad nikah⁹²

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh al-Nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:

- a. Calon pengantin (laki-laki dan perempuan)
- b. Wali (dua orang yang melakukan akad; yaitu wali/ wakil dan calon suami)
- c. Dua orang saksi
- d. *Sighat* akad nikah (Ijab dan qabul).⁹³

⁹² Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki, *Qawânin al-Ahkâm al-Syar'iyah*, Beirut, Dâr al-'ilm li al-Malâ'yîn, 1974, h. 219

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya *ijab* dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sebagaimana terlihat di bawah ini:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan;
- b. Adanya wali;
- c. Adanya saksi; dan
- d. Dilakukan dengan sighat tertentu.⁹³

Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali, sama sekali tidak menyebut secara tegas tentang syarat dan rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya statemen-statemen yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan, seperti menyebutkan perkawinan sah bila ada wali dan saksi. Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan

⁹³ Abi Zakariya Yahya al-Nawawi, edisi Syaikh 'Adil Ahmad Abd al-Maujud, *Rauḍahat-Ṭālibīn*, cat.I, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1412/1992, h. 382-400; lihat, Zainuddin bin ‘Abd al-‘Aziz al-Malibāri, *Fathu al-Mu’in bi Syarh Qurratu al-‘Ain* (Cirebon, al-Maktabah al-Miṣriyah, t.t, h. 99

⁹⁴ Abdul Rahman Ghodzali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 48-49

menurut Qudamah, adalah sabda Nabi yang mengatakan: “tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali”⁹⁵.

Jadi, yang dimaksud dengan syarat perkawinan disini ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

3. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Asas-asas dan/atau prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud disini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam.

Ada beberapa ayat al-quran yang berbicara sekitar prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya: QS Al-Baqarah (2): 187, 228 dan 233; QS. An-Nisâ’ (4): 9, 19, 32 dan 58; An-Nahl (16): 90; at-Talak (65): 7.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, Khoiruddin Nasution mengungkapkan, minimal ada 5 prinsip perkawinan:⁹⁶

a. Prinsip musyawarah dan demokrasi;

⁹⁵ Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah. *Al-Mughni*, cet.1, Beirut, Dâr al-Fikr, 1404/1984, VII, h. 337-342

⁹⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, ACAdeMIA, Yogyakarta, 2005, h. 56

- b. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga;
- c. Prinsip menghindari dari kekerasan;
- d. Prinsip bahwa hubungan suami dan isteri adalah sebagai patner;
- e. Prinsip keadilan

Selain 5 prinsip tersebut di atas, masih ada prinsip lain, diantaranya:

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranyanya adalah diadakan *khitbah* (peminangan) terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak;
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan;
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri;

- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tenteram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya;
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, sebagaimana termaktub didalam penjelasan umumnya, sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁹⁷
- b. Dalam Undang-Udang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perturan perundang-undangan yang belaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan

⁹⁷ Penjelasan Umum UU no 1 tahun 1974, butir 4.a

seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.⁹⁸

- c. Undang-undang ini menganut asas monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.⁹⁹
- d. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah

⁹⁸ Penjelasan Umum UU no 1 tahun 1974, butir 4.b.

⁹⁹ Penjelasan Umum UU no 1 tahun 1974, butir 4.c

kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.¹⁰⁰

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.¹⁰¹ Untuk mungkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan non Islam.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga

¹⁰⁰ Penjelasan Umum UU no 1 tahun 1974, butir 4.d

¹⁰¹ Penjelasan Umum UU no 1 tahun 1974, butir 4.e

maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.¹⁰²

Kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari alquran dan alhadist, yang kemudian di tuangkan dalam garis-garis hukum melalui undang-undanhg no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam tahun 1991 mengandung 7 asas kaidah hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- b. Asas keaabsahan perkawinan di dasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus di catat oleh petugas yang berwenang;
- c. Asas monogami terbuka;
- d. Asas calon suami dan isteri telah matang jiwa raganya dapat mel;angsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan

¹⁰² Penjelasan Umum UU no 1 tahun 1974, butir 4.f

yang baik dan sehat sehingga tidak berfikir kepada perceraian;

- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian;
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat;
- g. Asas pencatatan perkawinan.

4. Tujuan Perkawinan

Istilah yang dipakai para ahli dalam menyebutkan tujuan perkawinan, ada yang memakai **istilah tujuan**, ada juga yang memakai **istilah manfaat**, dan ada juga yang memakai **istilah faedah** serta ada pula yang menyebutnya dengan **hikmah perkawinan**. Demikian juga para ahli tidak sama dalam menyebutkan banyaknya tujuan perkawinan serta urut-urutannya. Dalam pembahasan ini dipakai istilah tujuan.

Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum.¹⁰³ Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat

¹⁰³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, ACAdeMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009, h. 223

al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Sejumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu:

- a. Bertujuan untuk membangun keluarga *sakinah*;
- b. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (*reproduksi*), dan secara tidak langsung sebagai jaminan *eksistensi* agama Islam;
- c. Bertujuan untuk pemenuhan *biologis* (seksual);
- d. Bertujuan untuk menjaga kehormatan;
- e. Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara *implisit* dari sejumlah ayat al-Quran dan secara *eksplisit* disebutkan dalam hadis.¹⁰⁴

Disebutkan dalam QS. ar-Rūm (30): 21;¹⁰⁵ dalam hal ini tujuan perkawinan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

¹⁰⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, ACAdemia, Tazaf, Yogyakarta, 2009, h. 223-228

¹⁰⁵ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. Lihat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Uraian dan Pembinaan Syariat, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 573

Begitu juga, disebutkan dalam QS. an-Nahl (16): 72,¹⁰⁶ QS.an-Nisâ' (4): 1, untuk tujuan regenerasi dan/atau penegembangbiakan manusia (*reproduksi*).¹⁰⁷ Dengan tercapainya tujuan reproduksi, maka tujuan memenuhi kebutuhan biologis, sebagaimana difirmankan dalam QS.al-Ma'arij (70): 29-31, Al-Baqarah (2): 187, 223 dan QS. an-Nūr (24): 33, akan dengan sendirinya tercapai, sekaligus terciptanya ketenangan dan cinta kasih dalam kehidupan keluarga.

Lebih lanjut tujuan perkawinan, adalah menjaga kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam QS.al-Ma'arij (70): 29-31, QS. al-Mu'minūn (23): 5-7, QS. an-Nūr (24): 33. Tujuan yang tidak dapat ditinggalkan dalam perkawinan dapat dipahami secara implisit dalam al-quran, bahwa salah satu tujuan hidup manusia

¹⁰⁶ Dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah ?". Lihat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Uraian dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 374

¹⁰⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, Op. Cit, h. 226; Lihat juga: Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I*, ACAdemia, Tazzafa, Yogyakarta, 2004, h. 40.

adalah ibadah. Hal ini dapat dipahami dalam QS. al-Mu'minun (23): 115, QS. Az-Zâriyât (51): 56.

Sementara sunnah Nabi Muhammad Saw yang berbicara tentang tujuan perkawinan ialah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (أخرجه مسلم في كتاب النكاح)¹⁰⁸

“Dari Abdillah berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami, “hai para pemuda barang siapa diri kalian mampu untuk menikah, maka nikahlah, sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga farji (memelihara kehormatan/kemaluan); sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu sahawat”. (diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Nikah).

ولكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأزكو ، وأتزوَّج النساء ، فمن رغب عن سنَّتي فليس مني .». أخرجه البخاري ومسلم.¹⁰⁹

¹⁰⁸Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣaḥih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, tth), h. 593

¹⁰⁹ Abu as-Sa'ādât ibn Ašir, *Jâmi'u al-Uṣul min Ahâdîs ar-Rasûl*, Juz I, Multaqa ahlu al- hadis, h. 84; Lihat, Jalaluddin as-Suyuṭi, *Jamî'u al-Hadis*, al-Mausu'ah al-arabiyah,

“Aku sendiri berpuasa, berbuka, shalat dan tidur, dan menikahi wanita, seraya mengatakan, siapa yang benci sunnahku, maka orang tersebut tidak termasuk umatku”.

Beberapa hadis tersebut mempertegas dan memperjelas tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam al-Quran, yang menyatu dan terpadu (*integral* dan *induktif*), yang harus diletakan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, baik yang berhubungan dengan suruhan untuk menikah bagi pemuda-pemudi yang sanggup/ mampu, merupakan perintah dan anjuran dari agama yang sebagai bagian dari ibadah, juga terdapat unsur sosial kemasyarakatannya,

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri tetapi disebutkan dalam rumusan perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 bahwa tujuan tersebut ialah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹¹⁰

Dalam KHI, tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 3 yaitu “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

¹¹⁰ UU No. 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan*, Pasal 1.

sakinah, mawaddah, dan rahmah".¹¹¹ Tujuan ini ditarik dari firman Allah dalam QS. ar-Rūm (30) ayat 21. Sekalipun secara redaksi berbeda, tetapi tujuan perkawinan menurut UU No. 1/1974 dengan KHI esensinya tidaklah berbeda, yaitu membentuk keluarga yang bahagia (*sakinah*) dengan dilandasi oleh *mawaddah wa rahmah*.

Secara eksplisit, ada sisi perbedaan tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan ialah: "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Berdasarkan UU Perkawinan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan definisi Sayuti Thalib yaitu: perkawinan adalah perjanjian kokoh dan suci antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kasih mengasihi, tenteram dan kekal. Sedangkan definisi kekal itu diambil dari ajaran Katolik

¹¹¹ Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

Roma, yang mengartikan perkawinan itu adalah sehidup semati. Namun bisa juga diartikan bahwa perkawinan itu harus ada kesetiaan antara pasangan suami dan istri.

Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Artinya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam, Kristen, Budha, Hindu adalah sah menurut UU Perkawinan. Berbeda halnya menurut Pasal 4 KHI yaitu "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan". Artinya KHI lebih menekankan perkawinan dalam konsep hukum Islam, namun tetap didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974.

5. Hikmah Perkawinan

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke-generasi seterusnya. Juga menjadi penyalur nafsu birahi yang halal, melalui hubungan suami istri yang sah, serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong-menolong dalam wilayah

kasih sayang, dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan.¹¹² Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi,¹¹³ sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghozali, bahwa diantara hikmah-hikmah dari pernikahan adalah:

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses pemakmuran bumi yang dikerjakan bersama-sama akan berjalan dengan mudah;
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya tertib dan teratur;
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi mamakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan;

¹¹²Syaikh Kamil Muhammad 'uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta:pustaka al-kautsar, 1998) h. 378

¹¹³Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh* (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam), Penerjemah: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), h. 256-258; Lihat, Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 65-68.

- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan duka, penolong dalam mengatur kehidupan. Sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah (QS. Al-A'râf (7): 189)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
إِلَيْهَا

“...Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang(tenang) kepadanya...”

- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya;
- f. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan;
- g. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik yang sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak;

- h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahan, yaitu: ¹¹⁴

- a. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan, serta memelihara nasab dengan baik yang memang sepenuhnya diperhatikan oleh Islam;
- b. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan (perbuatan maksiat) ;
- c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama antar suami isteri, saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak; menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan; ¹¹⁵

¹¹⁴ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya:Gita Media Press, 2006) h. 10-12

¹¹⁵Slamet Abidin, dan H. Aminudin : *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h.(?)

- d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan, adanya pembagian tugas dan menimbulkan rasa tanggung jawab dalam mencukupi keluarga;
- e. Dalam salah satu pernyataan PBB yang diberitakan oleh harian “National” terbitan Sabtu 6 Juni 1959, sebagaimana dikutip oleh Bukhori, mengatakan:¹¹⁶ “Bahwa orang yang bersuami istri umurnya lebih panjang umurnya, daripada orang-orang yang tidak bersuami istri, baik karena menjanda, bercerai atau sengaja membujang.

B. Larangan dan Batalnya Perkawinan

1. Perkawinan yang dilarang

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan; yakni perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Secara garis besar larangan perkawinan antara seorang pria dan wanita, karena:

¹¹⁶M. Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 7-10

a. Larangan Perkawinan Karena Pertalian *Nasab*;

Larangan perkawinan ini, sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah (QS. An-Nisâ (4): 23):

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَالَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
٢٣

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan¹¹⁷; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuanmu sesusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan

¹¹⁷ Yang dimaksud dengan ibu di awal ayat ini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak-anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke-bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur Ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya. Lihat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Uraisi dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, 106

dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”(QS. An-Nisâ (4): 23)¹¹⁸

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian *nasab* adalah:

- 1) Ibu; yang dimaksud adalah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke-atas, yaitu; ibu, nenek (baik dari pihak garis keturunan ayah maupun ibu, dan seterusnya ke-atas);
- 2) Anak perempuan; yang dimaksud adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke-bawah, yaitu: anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke-bawah;

¹¹⁸Dirjen Bimas Islam, Direktorat Uraisi dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 105-106

- 3) Saudara perempuan (adek/ kakak); baik se-ayah se-ibu, se-ayah saja, atau se-ibu saja;
- 4) Saudara perempuan ayah atau ibu (bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu); baik saudara sekandung ayah atau seibu;
- 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan).¹¹⁹

Sebagaimana difirmankan Allah (QS. An-Nisā (4): 23), yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan,¹²⁰ saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang

¹¹⁹Zakiah Daradjat (*et al*), *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid 2, h. 65; Lihat, Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 105; lihat pula, Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Beirut, Dār al- Fikr, tt, juz.2, h. 24; Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut, Dār al-Fikr, 1983), cet.4, jilid 2, h. 62.

¹²⁰yang dimaksud dengan anak-anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya.. Lhat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari’ah, Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, 106

laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...”

b. Larangan Perkawinan karena hubungan Pertalian Kerabat (Semenda)

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan perkawinan (semenda) ¹²¹ adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu isterimu (mertua perempuan); termasuk juga nenek perempuan isteri, baik dari garis ibu atau ayah;
- 2) Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri (anak tiri)
- 3) Isteri-isteri anak kandungmu (menantu); termasuk juga isteri cucu;
- 4) Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah (ibu tiri); tanpa disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ayah dan ibu.

Keharaman ini disebutkan dalam (QS. An-Nisâ (4): 23), dan QS An-Nisâ' (4): 22, yaitu:

¹²¹Pasal 39 ayat (2) *Kompilasi Hukum Islam*

وَأَمَّهَتْ نِسَائِكُمْ وَرَبَّيْنِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“Dan (diharamkan) atas kamu (mengawini) ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) ¹²² yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)...”(QS. An-Nisâ (4): 23)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

“dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu...”
QS An-Nisâ’ (4): 22.

c. Larangan Perkawinan Karena Hubungan Sesusuan

Hubungan sesusuan menjadikan orang mempunyai hubungan kekeluargaan yang sedemikian dekatnya. Mereka yang sesusuan itu telah menjadi saudara dalam pengertian hukum perkawinan ini, sehingga disebut

¹²² Yang dimaksud anak tiri dalam ayat ini, sama adakah yang dalam pemeliharaanmu ataupun yang tidak dalam pemeliharaanmu

saudara sesusuan; tetapi pendekatan ke-dalam saudara sesusuan, tidak menjadikan hubungan persaudaraan sedarah untuk terjadinya saling mewarisi.¹²³

Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan ini berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam kelanjutan (QS. An-Nisâ (4): 23), yaitu:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ

“Dan (diharamkan) atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu; dan saudara perempuan sepersusuan”.

Hadis yang terkait:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَاهُ فُلَانًا (لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَا عَةِ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ ، قَالَتْ : فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَاهُ فُلَانًا" (لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا (لِعَمِّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ) دَخَلَ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ

¹²³ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), h. 53.

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَعَمْ" أَنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ
مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ"

“Pada suatu hari Rasulullah berada di kamar Aisyah dan Aisyah mendengar suara seorang laki-laki meminta izin masuk di rumah Hafshah. Aisyah berkata: Ya Rasulullah, saya pikir si fulan (seorang paman susuan Hafshah). Kemudian Aisyah berkata: Ya Rasulullah, dia meminta izin masuk kerumahmu, kata Aisyah; maka Rasulullah menjawab: saya pikir yang meminta izin itu si fulan (seorang paman susuan Hafshah). Aisyah berkata: sekiranya si-fulan itu masih hidup (seorang paman susuan Aisyah, tentu juga dia boleh masuk ketempatku)? Rasulullah menjawab: benar, sesungguhnya susuan itu mengharamkan apa yang diharamkan lantaran hubungan keluarga.”¹²⁴

- d. Larangan pernikahan untuk sementara waktu
(*Mahram Ghairu Muabbad*)

Mahram ghairu muabbad, yaitu larangan perkawinan yang berlaku hanya untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan

¹²⁴Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadis* 5, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003), h.73; Lihat, Al Bukhary 52, h.7; Muslim 17, h. 1; Al Lu-lu-u wal Marjân 2, h.114; Ahmad Multazam, *Batalnya Perkawinan dan Larangan Pernikahan*, Blogspot.Com/2013/12/Batalnya-Perkawinan-Dan-Larangan.Html, Akses, 06 Feb 2015

itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin untuk sementara itu berlaku dalam hal-hal seperti berikut:

- 1) Mengawini (menghimpun) dua orang bersaudara dalam satu masa

Keharaman mengumpulkan (menghimpun) dua orang wanita bersaudara dalam satu masa perkawinan itu, disebutkan dalam lanjutan firman Allah QS. An-Nisâ' (4): 23

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

...dan diharamkan bagimu mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau...”

Hadis yang terkait:

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسَلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَّقْ أَيْتَهُمَا شِئْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَ قُطْنِي، وَأَعْلَهُ الْبُخَارِيُّ

“Dari Aḍ-Ḍaḥḥāk bin Fairuz Ad-Dailami, dari ayahnya r.a berkata, “Aku berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam sedang aku mempunyai dua istri kakak beradik, maka Rasulullah Saw bersabda: “Ceraikanlah salah seorang dari keduanya yang kamu kehendaki.” (HR. Ahmad dan Al-Arba’ah, kecuali An-Nasâ’i. Hadis Ṣahih menurut Ibnu Hibban, Ad-Daraqūṭni, dan ma’lul menurut al-Bukhari)”¹²⁵

2) Poligami di luar batas (lebih dari 4 orang)

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak menikahi empat orang, dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya, dan habis pula masa iddahnya. Dengan begitu perempuan kelima itu haram dinikahnya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang di antara istrinya yang empat itu belum diceraikan.

3) Larangan karena Ikatan Perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan, haram dikawini oleh siapapun. Keharaman

¹²⁵Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam - Syarah Bulughul Marâm*, (Jakarta: Dârus Sunnah Press, 2013), h. 992.

itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya. Setelah suami mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai masa iddahnya, barulah ia boleh dikawini oleh siapa saja,¹²⁶ sepanjang tidak ada larangan lain yang menentukannya.

Keharaman mengawini perempuan bersuami itu, sebagaimana diungkap-kan dalam QS. An-Nisâ' (4):

24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan,¹²⁷ (tawanan perang) yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu”.

4) Larangan karena Talak Tiga (*bâ'in kubro*)

¹²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 125-128

¹²⁷ Hamba sahaya dan perbudakan yang dimiliki dalam pengertian ini, yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya, seiring dengan perkembangan zaman, pada saat sekarang ini sudah tidak ada.

Perempuan yang ditalak tiga, haram menikah lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau wanita itu sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin, juga telah dicerai oleh suami terakhir itu, serta telah habis masa ‘iddahnya. Hadis Rasulullah yang terkait dengan ini, sebagai berikut:

وَرَادَ ابْنُ رُمَحٍ فِي رِوَايَتِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: لَا حَدِّهِمْ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا ، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمْتَ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ. قَالَ مُسْلِمٌ : جَوَدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ : تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً .¹²⁸

“Ibnu Ruhm menambahkan dalam riwayatnya: apabila Abdullah di tanya tentang hal itu (seorang suami yang menceraikan istrinya yang sedang haid), maka dia mengatakan kepada salah seorang dari mereka (yang bertanya), “jika kamu menceraikan istrimu dengan talak satu atau talak dua, maka sesungguhnya Rasulullah Saw memerintahkan hal ini kepadaku; tetapi jika kamu menceraikan istrimu dengan talak tiga, maka mantan istrimu itu telah haram bagimu sampai dia menikahi lelaki selain

¹²⁸Imam An-Nawâwi, *Ṣaḥih Muslim bi Syarh An-Nawawī*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 176

kamu, dan engkau telah bermaksiat kepada Allah terkait dengan apa yang di perintahkan-Nya kepadamu dalam hal menceraikan istrimu.”

5) Larangan karena Ihram

Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram *umrah* maupun *haji*, tidak boleh dinikahi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Usman bin Affan:

سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ . رواه مسلم¹²⁹

“Saya mendengar Uṣman bin Affan berkata: Rasulullah Saw bersabda: Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang” (Diriwayatkan Muslim dari Ustman bin Affan).”

6) Larangan Karena *Musyrik* (Beda Agama)

¹²⁹Imam An-Nawâwi, *Ṣaḥih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 544

Yang dimaksud dengan beda agama disini adalah, perempuan muslimah dengan laki-laki *non* muslim dan sebaliknya. Dalam istilah fiqh disebut kawin dengan orang kafir. ¹³⁰ Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah kawin dengan laki-laki musyrik terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu". (QS. al-Baqarah (2): 221)

¹³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) , h. 133

Ayat 221 QS. al-Baqarah tersebut, tidak menyebutkan beda agama, melainkan menyebut perempuan dan laki-laki musyrik. Sedangkan yang dimaksud perempuan musyrik menurut Abdul Rahman Ghozali,¹³¹ adalah “yang menyembah selain Allah”. Karena itu wanita *ahlu al-kitab* (wanita Nasrani dan wanita Yahudi) boleh dinikahi, berdasarkan Firman Allah dalam QS.al-Mâidah (5): 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang Ahli al Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal (pula) bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang

¹³¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 114

menjaga kehormatan ¹³² diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya perempuan piaraan (gundik)”.

Hadis Terkait dengan larangan menikah beda agama, adalah:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ , لِمَا لَهَا , وَلِنَسَبِهَا , وَلِجَمَلِهَا , وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ (رواه البخاري في كتاب النكاح) .

“Dari Abi Hurairah r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda: "wanita itu boleh dinikahi karena empat hal: 1) karena hartanya; 2) karena asal-usul (keturunan) nya; 3) karena kecantikannya; 4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam, (jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu (HR. Bukhari, dalam ‘Kitab an-Nikah’)”

7) Larangan karena waktu *Iddah*

¹³² Ada yang mengatakan perempuan-perempuan yang merdeka; Lihat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, 143

Perempuan yang sedang dalam waktu iddah, baik ‘iddah cerai maupun. ‘iddah ditinggal mati, berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 228 dan 234

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

“Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.¹³³ Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka (merujuknya) dalam (masa) menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah/perbaikan....”(QS. Al-Baqarah (2): 228).¹³⁴

Dan lagi Firman Allah sebagaimana QS An-Nisâ (4): 234

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

¹³³ Quru' adalah jama' dari qar'u, yang berarti suci atau haiḍ

¹³⁴ Lihat, QS. An-Nisâ (4): 228 dan 234

فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ’iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat(QS. Al-Baqarah (2): 234).

8) Istri yang Putus Perkawinan karena Li’an

Menurut bahasa *li’an* diambil dari kata *la’ana* artinya laknat (kutukan). Maksudnya adalah laknat atau kutukan Allah kepada suami-istri yang saling bermula’*anah* atau saling kutuk yang lima kali mengucapkan kesediaan dilaknat oleh Allah.¹³⁵ Bisa juga berarti menjauhkan atau *al-ṭardu min al-khair* yang berarti pengusiran dari kebaikan atau dikeluarkan dari kebaikan, bisa juga isimnya adalah *al-la’nah*, maka jama’nya adalah *li’än, li’änät*.¹³⁶

¹³⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, h. 182

¹³⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufaṣṣal fî ahkâm al-mar’ah wa al-bait al-muslim fî al-Syari’ah al-islamiyyah*, Jilid VIII: Muassasah Risalah Beirut, h. 320-321

Menurut istilah syara' li'an berarti sumpah seorang suami dimuka hakim bahwa ia berkata benar tentang sesuatu yang dituduhkan kepada istrinya perihal perbuatan zina, dengan tidak mengemukakan saksi, kemudian keduanya bersumpah atas tuduhan tersebut.¹³⁷ Atau dengan kata lain suami menuduh istrinya berzina, dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian yang kelima disertai persyaratan bahwa sang suami bersedia untuk menerima laknat Allah apabila ia berdusta atas tuduhannya.¹³⁸ Dalam redaksi yang berbeda, *li'an* ialah sumpah dengan redaksi tertentu yang diucapkan suami bahwa isterinya telah berzina atau ia menolak bayi yang lahir dari isterinya sebagai anak kandungnya, dan kemudian sang isteri pun bersumpah bahwa tuduhan

¹³⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, h. 182; Lihat, Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 238-239

¹³⁸ <http://mbainayah.blogspot.com/2014/11/fasakh-lian-ila-dan-dzihar.html>, Akses 18 feb 2015

suaminya yang dialamatkan kepada dirinya itu bohong.

139

Mencermati, arti *li'an* di atas, dapat dipahami bahwa, *li'an* adalah suami isteri yang saling menyatakan bersedia dilaknati oleh Allah setelah masing-masing suami isteri mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan dengan sumpah masing-masingnya, karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak yang lain melakukan zina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung/dilahirkan oleh isterinya sebagai anaknya sendiri, dan pihak isteri bersikeras pula menolak tuduhan suami sedang mereka tidak memiliki alat bukti yang diajukan kepada hakim.

Dasar hukum pengaturan Li'an ini termaktub pada firman Allah QS. An-Nūr (24): 6-7

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦

¹³⁹Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufaṣṣal fī ahkāmī al-mar'ah wa al-bait al-muslim fī al-Syari'ah al-islamiyyah*, Jilid VIII: Muassasah Risalah Beirut, h. 320-321

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar”. (QS. An-Nūr (24): 6)

وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ ٧

“Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta” (QS. An-Nūr (24): 7).¹⁴⁰

Terhadap tuduhan suami tersebut, istri dapat menyangkalnya dengan sumpah kesaksian sebanyak empat kali bahwa suami itu berdusta dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian yang kelima disertai pernyataan bahwa istri bersedia untuk menerima laknat/marah dari Allah jika suaminya memang benar dalam tuduhannya.¹⁴¹ Dengan terjadinya sumpah li'an ini maka terjadilah suatu

¹⁴⁰Dimaksud dengan ayat 6 -7 QS. An-Nūr tersebut ialah: orang yang menuduh berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa dia adalah benar dalam tuduhannya itu. Kemudian dia bersumpah sekali lagi, bahwa dia akan kena laknat Allah jika dia berdusta. Masalah ini dalam fiqih dikenal dengan li'an.

¹⁴¹ Lihat, (QS. An-Nūr (24): 8-9)

perceraian antara suami istri tersebut dan keduanya tidak boleh terjadi perkawinan kembali untuk selamanya.¹⁴²

2. Batalnya Perkawinan

Pada dasarnya suatu perkawinan dikatakan batal (dibatalkan) apabila perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat sesudah diajukan kepengadilan. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.¹⁴³

Didalam Pasal 85 KUHPerdata berlaku asas pokok, bahwa tiada suatu perkawinan menjadi batal karena hukum. Pernyataan batal suatu perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang disyaratkan adanya keputusan pengadilan, keputusan yang demikian hanya boleh dijatuhkan dalam hal-

¹⁴² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 238-240

¹⁴³ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h. 83

hal yang diatur oleh undang-undang dan atas gugatan orang-orang yang dinyatakan berwenang untuk itu.¹⁴⁴

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan perkawinan, karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi menurut Pasal 22 Undang-undang perkawinan: yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan, namun bila rukun yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah.¹⁴⁵ Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan baik berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 atau berdasarkan KHI

Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 22, 24, 26 dan 27, serta berdasarkan KHI pasal 70 dan 71 sebagai berikut:

- a. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22);

¹⁴⁴Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana: 2010), cet.ke-2, h.123

¹⁴⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 40

- b. Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 24);
- c. Ayat (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri (Pasal 26 ayat (1));
Ayat (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah (Pasal 26 ayat (2));
- d. Ayat (1): Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan

dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat (1));

Ayat (2): Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri (Pasal 27 ayat (2));

Ayat (3): Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur (Pasal 27 ayat (2));

Dalam Perspektif KHI, ditegaskan pada Pasal 70 KHI: bahwa Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'I;
- b. Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
- c. Seseorang menikahi istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah

menikah dengan pria lain yang kemudian cerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Paal 8 UU No.1/1974, yaitu:

- 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ayah tiri;
- 4) berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/paman sesusuan;
- 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Ditegaskan juga pada Pasal 71 KHI bahwa, Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*; ¹⁴⁶
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lainnya;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1/1974; ¹⁴⁷
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 UU No. 1 /1974 dan pasal 73

KHI, yaitu:

Pasal 23:

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

¹⁴⁶*Mafqud*; dimaksud dengan *mafqud* disini adalah suami yang menghilang tanpa kabar berita apakah dia masih hidup atau sudah meninggal.

¹⁴⁷ Pasal 7 UU no 1 tahun 1974, ayat (1) menetapkan bahwa: perkawinan hanya diizinkan, jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun; ayat (2): dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Selain permohonan pembatalan perkawinan itu, Pasal 74 KHI juga mengatur tata cara beracara dalam permohonan pembatalan perkawinan, dan mengatur awal waktu keberlakuan pembatalan perkawinan dimaksud.

Pasal 74 KHI:

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan;

- (2) Batasnya suatu perkawinan setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Walaupun sudah terjadi pembatalan perkawinan, mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut telah diatur dalam pasal 28 ayat 2 UU perkawinan dan dalam pasal 75 dan 76 KHI, yaitu:

Pasal 75 KHI

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap;

1. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 KHI Batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.

BAB III

HUKUM PERKAWINAN KHUNSA

A. *Khunsa* dalam Pandangan Islam

1. Pengertian *Khunsa*

Pada dasarnya, Allah Swt menciptakan manusia hanya dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Firman Allah dalam QS. An-Nisa (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (QS. An-Nisa (4): 1) ¹⁴⁸

juga dituangkan dalam QS. Al-Hujurat (49): 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا

¹⁴⁸Dirjen Bimas Islam, Direktorat Uraisi dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Tehazed, Jakarta, 2010, h. 99-

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.”(QS. Al-Hujurat (49): 13).¹⁴⁹

Bila dipahami makna dari kedua ayat tersebut, ternyata kedua alat kelamin tersebut mempunyai urgensi yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya untuk menentukan seseorang kepada jenis laki-laki atau perempuan. Tidak ada alat kelamin yang lain yang dapat digunakan untuk menentukan suatu makhluk kepada jenis ketiga. Namun dalam hal-hal tertentu hukum membedakan ketentuan antara laki-laki dan perempuan, antara lain dalam hal perkawinan, Allah Swt telah menjelaskan anjuran dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah, tetapi tidak menjelaskan perihal perkawinan bagi khunsa.

Istilah *khunsa* berasal dari bahasa Arab *khanasa* yang berarti lunak atau melunak. 150

Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “banci”, “wadam” (wanita-adam) atau “waria” (wanita-pria); Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, *khunsa*

¹⁴⁹ *Ibid.* 745

¹⁵⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawwir, 1984), h. 382

adalah orang yang diragukan jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan karena memiliki alat kelamin secara bersamaan ataupun tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin laki-laki atau perempuan.¹⁵¹

Orang dengan ketidakjelasan status jenis kelaminnya ini disebut *khunsa*. Diskusi mengenai *khunsa* sebenarnya bukanlah diskusi yang asing dalam ranah hukum Islam. Pada zaman jahiliyah pernah dikisahkan bahwa Amir bin Adz-Dzarb (ulama di masa jahiliyah) yang dimintai pendapat tentang seorang wanita yang melahirkan anak dengan dua jenis kelamin. Namun belakangan ini mulai ada pembicaraan bahwa masalah *khunsa* mulai terasa pelik dan kompleks utamanya jika dihadapkan dengan masalah global seperti HAM dan perkembangan gender di masyarakat. Dalam hukum Islam *khunsa* dipahami sebagai “orang dengan alat kelamin ganda” atau “orang dengan ketidakjelasan alat kelamin”.¹⁵²

Kata “*khunsa*” berasal dari bahasa Arab yang di ambil dari kata *al-khans*, dibentuk atas *wazan* (timbangan) *fu’la*, dengan arti

¹⁵¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van hoeve, 1996), h. 934

¹⁵² . Muhammad Arief, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1986, h. 116

asal ‘lunak’, ‘halus’ dan ‘lemah lembut’. Jamaknya *khunasa* seperti kata *hubla* jamaknya *hubala*.¹⁵³

Secara etimologi *al-khuntsa*, dari kata *khanats* الْخَنْثُ, yang berarti: lembut dan pecah. Adapun secara terminologi *khuntsa* yang dipaparkan oleh Sayyid Sabiq yaitu:

الْخُنْثَى شَخْصٌ اِسْتَبَهَ فِي اَمْرِهِ وَ لَمْ يُدْرَ اَذَكَرَ هُوَ اَمْ خُنْثَى، اِمَّا لِاَنَّهُ
ذَكَرًا وَ فَرْجًا مَعًا اَوْ لِاَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُمَا اَصْلًا

“Orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah ia seorang laki-laki atau perempuan. Karena ia memiliki penis (alat kelamin laki-laki) dan vagina (alat kelamin perempuan) secara bersamaan, atau ia tidak memiliki keduanya sama sekali”¹⁵⁴.

Wahbah Az-Zuhaili dalam mengungkapkan terminologi *khunsa* adalah:

¹⁵³. Hafizh Dasuki, dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3, PT Intermedia, Jakarta, Cetakan 1993, h. 57

¹⁵⁴. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Dar ats-Tsaqafah Al-Islamiyah, Jilid III, h. 313.

الْخُنْثَى : مَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ الْعُضْوَانِ الْتَّانِ : عُضْوُ الذُّكُورَةِ وَعُضْوُ
الْأُنُوثَةِ، أَوْ مَنْ لَمْ يُوجَدَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهَا أَصْلًا

“Orang berkumpul pada dirinya dua alat kelamin, kelamin laki-laki atau kelamin perempuan, atau orang tidak didapati pada dirinya alat kelamin laki-laki atau perempuan sama sekali”¹⁵⁵.

Ulama Fiqh yang lain, seperti Sayyid Syabiq dan Ibnu Qudamah dalam kitab *fiqih sunnah*, mengungkapkan bahwa *khuntsa* adalah orang yang diragukan, tidak diyakini dan tidak diketahui apakah dia berstatus laki-laki atau berstatus perempuan, ada kalanya dia mempunyai *zakar*(*penis*) dan *farji*(*vagina*), atau tidak mempunyai alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin laki-laki *zakar* (*penis*), ataupun alat kelamin perempuan *farji*(*vagina*), atau seseorang yang hanya mempunyai lubang yang berada di tempat *vagina* sebagai tempat keluar *urin*baginya.¹⁵⁶

Khunsa menurut Imam An-Nawawi dalam Al Muhadzab menjelaskan bahwa *Khunsa* itu ada 2 (dua) macam, yaitu orang

¹⁵⁵. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adilatuhu*, Dar Al-Fikr, Cet II, 1985, Jilid VIII, h. 426

¹⁵⁶. Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid XIV, Bandung : Al-Ma'arif, 1987, h. 285,

yang baginya memiliki 2(dua) alat kelamin, yakni (kelamin lelaki dan kelamin perempuan) dan orang yang tidak mempunyai alat kelamin seperti diatas tetapi baginyaterdapat lubang (serupa *vagina/farji*), yang dari lubang itulah keluar sesuatu yang keluar seperti air kencing, sperma, darah haid dan lain sebagainya.¹⁵⁷

Dilihat dari kacamata medis jenis kelamin seorang khunsa dapat dibuktikan bahwa pada bagian luar tidak sama dengan bagian dalam; misalnya jenis kelamin bagian dalam adalah perempuan dan ada rahim, tetapi pada bagian luar berkelamin lelaki dan memiliki penis atau memiliki keduanya (penis dan vagina), ada juga yang memiliki kelamin bagian dalam lelaki, namun dibagian luar memiliki vagina atau keduanya. Bahkan ada yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali, artinya seseorang itu tampak seperti perempuan tetapi tidak mempunyai lubang *vagina* dan hanya lubang kencing atau tampak seperti lelaki tapi tidak memiliki penis.¹⁵⁸

Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah dalam kitabnya *Al-Waris fis Syariatil Islamiyah*, menjelaskan bahwa oleh karena keadaannya seperti di atas, maka urusan statusnya juga menjadi

¹⁵⁷Imam Nawawi, *Al Muhadzab*, juz 2 h. 414 (Maktabah Syamilah)

¹⁵⁸Dja'far Abdul Muchit, *Problema Hukum Waria dan Operasi Kelamin*, h.

samar tidak jelas apakah lelaki atau perempuan. Karena pada asalnya jenis manusia itu lelaki atau perempuan. Dan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban hukum sendiri-sendiri. Yang membedakan ia lelaki perempuan adalah alat kelamin. Bagaimana halnya bila ia mempunyai dua alat kelamin bersamaan atau tidak ada sama sekali. Disitulah letak kemusykilannya. Namun hal tersebut terkadang bisa menjadi jelas bila ia dewasa dengan melihat fungsi alat kelamin mana yang lebih berperan tapi banyak juga yang sampai dewasa tetap musykil.

2. Pembagian *Khunsa*

Sebagian besar Ulama seperti Imam Muhammad Sibthi Al-Mardini dalam kitabnya yang berjudul *Sarakh kasyifatussaja* membagi *khunsa* dalam dua kategori yaitu: *khunsa ghairu musykil* dan *khunsa musykil*.¹⁵⁹

a. *Khunsa Ghairu Musykil*

Khunsa ghairu musykil adalah *khunsa* yang tidak sulit ditentukan jenis kelaminnya berdasarkan ciri-ciri fisik yang dominan. Misalnya seseorang memiliki kelamin ganda, penis dan vagina, tetapi kencingnya melalui penis, dia mempunyai

¹⁵⁹ . T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Fihul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta : 1974, h. 285.

kumis, mempunyai jenggot, badannya kekar, maka dengan mudah bisa ditentukan, jenis kelaminnya adalah laki-laki. Demikian juga sebaliknya.¹⁶⁰

Terhadap *khuntsa* yang jelas dan nyata, dapat dihukumkan sebagai laki-laki atau perempuan karena jenis kelamin, sifat-sifat dan tingkah lakunya, yaitu sebelum *baligh* dapat diketahui dengan keluar kencingnya dengan alat kelamin laki-laki, maka ia dihukumi laki-laki; jika dengan alat kelamin perempuan, maka ia dihukumi perempuan. Setelah *baligh* apabila ia tumbuh jenggot, keluar mani maka dia dihukumi laki-laki. Dan apabila ia berpayudara seperti perempuan atau keluar air susunya atau *haidl* atau ia dapat hamil, maka ia dihukumi sebagai perempuan¹⁶¹

Masjful Zuhdi mengungkapkan dalam bukunya *Masail Fiqhiyyah* mengatakan, bahwa *khunsa* adalah orang yang mempunyai organ kelamin ganda yang berbeda, organ kelamin pria dan wanita, atau tidak mempunyai sama sekali (tidak jelas identitas jenis kelaminnya). Apabila *khuntsa* mempunyai

¹⁶⁰ . Nur Khoirin YD, “Operasi kelamin dalam Perspektif Hukum Islam”, Al-Ahkam, XV, I, April, 2004, h. 99.

¹⁶¹ . Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, Angkasa, Bandung, 2005.h. 200.

indikasi-indikasi yang lebih cenderung menunjukan ke jenis kekelakuan atau sebaliknya, maka ia disebut *khuntsa ghairu musykil*.¹⁶²

b. *Khuntsa Musykil*

Khuntsa musykil adalah jenis *khuntsa* yang setelah diteliti, masih sulit ditentukan jenis kelaminnya karena ciri-ciri fisik tidak menunjukan jenis kelamin tertentu.¹⁶³

Masih menurut Masjfuk Zuhdi, apabila *khuntsa* itu tidak mempunyai indikasi-indikasi atau ciri-ciri yang khas yang bisa menunjukan ke jenis kelamin tertentu, pria atau wanita, atau ia mempunyai indikasi-indikasi khas yang kontradiktif, maka ia disebut *khuntsa musykil*.¹⁶⁴

Menurut Muslich Maruzi bahwa *khuntsa* dapat dibagi menjadi beberapa macam sebagai berikut: ¹⁶⁵

¹⁶² . Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta : Haji Masagung, 1982, h. 170.

¹⁶³ . Hasbi Ash-Shiddieqi, *Loc. Cit.*

¹⁶⁴ . Masjfuk Zuhdi, *Op.Cit.*,h. 170.

¹⁶⁵ . Muslich Maruzi, *Pokok -Pokok Ilmu Waris*, Pustaka Amini, Semarang, 1981, h. 85.

- 1) Orang yang mempunyai alat kelamin ganda artinya orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan.
- 2) Orang yang tidak mempunyai alat kelamin sama sekali.
- 3) Orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki tetapi hormonnya lebih banyak perempuan, sehingga watak dan tabiatnya seperti perempuan.
- 4) Orang yang mempunyai alat kelamin perempuan, tetapi hormonnya lebih banyak laki-laki sehingga watak dan tabiatnya seperti laki-laki.
- 5) Ada juga *khuntsa* yang berkembang yaitu pada waktu kecil lebih tampak kekelakiannya, tetapi setelah dewasa lebih tampak kewanitaannya atau sebaliknya, pada waktu kecil tampak kewanitaannya tetapi setelah dewasa lebih tampak kekelakiannya.

3. Metode Penetapan Status *Khunsa*

Manusia yang diciptakan oleh Allah dimuka bumi ini adalah berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan.¹⁶⁶ Dari keduanya berkembang biak manusia baik laki-laki

¹⁶⁶ Lihat: QS. Al-Hujurat (49): 13.

maupun perempuan,¹⁶⁷ tidak ada alat kelamin yang lain, yang dapat digunakan untuk menentukan sesuatu makhluk kepada jenis ketiga. Dari Adam dan Hawa manusia berkembang biak di atas permukaan bumi sebagaimana fenomena yang tampak mendominasi dimata kita dimuka bumi ini. Berkembang biaknya manusia tersebut lantaran terjadinya suatu pertimbangan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya (QS. An-Nisa' (4): 1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النِّسَاء: ١)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya

¹⁶⁷ Lihat: QS. An-Nisa' (4): 1

Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.(QS. An-Nisa’ (4): 1) ¹⁶⁸

Dilain tempat Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
١٣ (الْحُجُرَات: ١٣)

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat”. (49): 13) ¹⁶⁹

Berpijak dari dua ayat di atas, Allah yang telah menciptakan manusia lelaki dan perempuan berikut kelengkapan dan tanda-tandanya sebagai lelaki atau perempuan. Namun sejarah mencatat dan fakta berbicara bahwa ternyata ada sekelompok orang yang sangat kecil jumlahnya, mungkin sejuta satu karena dalam statistik belum

¹⁶⁸ .Dirjen Bimas Islam, Direktorat Uraisi dan Pembinaan Syaria’ah, Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 99

¹⁶⁹ . Dirjen Bimas Islam, Ibid, h. 745

pernah diinformasikan berapa jumlah kelompok orang tersebut. Berbeda dengan jumlah lelaki atau perempuan yang sering diinformasikan, seperti informasi bahwa jumlah penduduk Indonesia 43% lelaki dan 57% adalah kaum perempuan.¹⁷⁰

Mereka itu adalah makhluk Allah yang disebut *khuntsa* (Waria). Mereka sepertinya belum mendapatkan perhatian dan seperti dibiarkan hidup pada habitatnya mencari dan berjuang mempertahankan hidup menurut maunya. Mereka seperti belum tersentuh hukum, tapi mereka terkadang dicari bila dibutuhkan atau diperlukan untuk suatu kepentingan atau tujuan sesaat. Berbagai Al-Quran dan Hadits Rasul telah banyak menjelaskan aturan hukum yang berkaitan dengan lelaki dan perempuan, tapi tidak menjelaskan suatu hukumpun yang berkaitan dengan waria (*khuntsa*). Hal ini menunjukkan ketidak mungkin adanya 2 (dua) alat yang berlawanan dan berkumpul pada seseorang. Untuk itu harus ada ketentuan status hukumnya lelaki atau perempuan.

h. 1 ¹⁷⁰ . Dja'far Abdul Muchit, *Problema Hukum Waria dan Operasi Kelamin*,

Mengingat semakin marak dan pesatnya perkembangan waria (*khuntsa*), seperti sekarang ini dan untuk menghindari akibat negatif, kiranya perlu penelitian khusus mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan *khuntsa* termasuk aturan hukum dan solusinya dalam menetapkan perkawinan khunsa bila disorot dari kacamata hukum Islam.

Pada prinsipnya Allah Swt menciptakan manusia hanya dari dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan seperti dalam firman-Nya:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ٥٤

“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita”.(QS. An- najm, (53): 45) ¹⁷¹

Status hukum yang diberlakukan oleh agama terhadap seseorang dilihat dari keadaannya secara lahir, termasuk status hukum menurut jenis kelamin. Hal ini juga dijelaskan oleh Rasulullah Saw dalam sebuah sabdanya :

أَمَرْتُ أَنْ أُحْكَمَ بِالظَّوَاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَّاءِ نُرُ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

¹⁷¹ .Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 766.

“Saya diperintahkan Allah Swt untuk menetapkan hukum berdasarkan fakta yang nampak, sedangkan Allah Swt menetapkan atau mengetahui segala yang tidak tampak atau yang tersembunyi”. (HR. Muslim)¹⁷²

Memahami maksud dari Hadis di atas, pada mulanya menjelaskan bahwa Rasulullah Saw marah kepada sahabat yang membunuh seorang musuh yang telah menyerahkan diri secara lahir, yang menurut sahabat penyerahan itu hanya taktik belaka. Lalu Rasulullah Saw menjelaskan sebagaimana bunyi Hadist di atas. Kendati hadis itu punya latar belakang (*asbab al-wurud*) pembunuhan terhadap orang kafir oleh orang Islam, namun maknanya dapat diberlakukan untuk penentuan status hukum terhadap seseorang berdasarkan jenis kelaminnya secara lahir.¹⁷³ Berdasarkan arti ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas, maka status hukum yang diberikan kepada seseorang sangat bergantung pada jenis kelamin yang dimilikinya, seperti pelaksanaan ibadah, perkawinan, warisan dan lain-lain.¹⁷⁴

¹⁷²Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuthi, *Al-Jami' As-Shoghair*, Maktabah Darul Ihya' Kutub Al-arabiah, Juz I, h. 66

¹⁷³ . Hafizh Dasuki, dkk, *Op.Cit.*, h. 934-935

¹⁷⁴ . Ibid, h. 934-935

Dalam buku Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama, karya Moh Yasir Alimi berpendapat, dalam fiqh memang hanya dikenal kategori perempuan dan laki-laki. Dikenal kategori *khuntsa* yang digunakan untuk merujuk pada tubuh yang mempunyai dua alat kelamin. Akan tetapi dia tetap dihukumi dengan kategori laki-laki atau perempuan.¹⁷⁵

Menurut fiqh yang dihukumi adalah yang paling kuat kecenderungannya, perempuan atau laki-laki, tidak bisa kedua-duanya. Pada dasarnya untuk menentukan seorang *khunsta* apabila dimungkinkan adalah mencari kejelasan jenis kelaminnya, tetapi apabila sulit menentukannya, para Ulama sepakat bahwa di dalam menentukan status hukumnya, indikasi fisiklah yang dipedomani, bukan gejala-gejala *psikis* (kejiwaannya).

Untuk menetapkan *khuntsa ghairu musykil*, para ulama telah menjelaskan cara-caranya, walaupun hal itu belum menjadi kesepakatan Ulama. Paling tidak bisa menjadi pedoman awal di dalam menentukan status seorang *khunsa*,

¹⁷⁵ .Moh, Yasir Alami, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial dari Wacana Bangsa hingga Wacana Agama*, Yogyakarta : Lkis, 2004, Prolog, h. 13.

diantara cara-cara tersebut dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

a. Melihat Cara Keluar Air Kencingnya

Apabila air kencingnya keluar lewat penis, berarti *khuntsa* tersebut dihukumi sebagai laki-laki. Sebaliknya jika air kencingnya keluar dari vagina, maka dia dihukumi sebagai perempuan. Bagaimana jika air kencingnya keluar dari keduanya? Bila air kencing tersebut keluar dari kedua alatnya, maka ditentukan dengan yang terlebih dahulu keluar. Jika yang keluar terlebih dahulu dari penis, maka dihukumi laki-laki, begitu juga sebaliknya. Jika keluar air kencingnya bersamaan, maka dilihat mana yang lebih lama keluarnya. Jika keluar dari kedua alat kelamin secara bersamaan dan selesainya juga secara bersamaan, maka *khuntsa* tersebut dapat digolongkan sebagai *khuntsa musykil*, dan diperlukan pengamatan yang lebih khusus lagi.

b. Melihat Pertumbuhan Organ Tubuh

Apabila *khuntsa* tersebut memiliki tanda-tanda khusus seperti berkumis atau berjenggot, serta mempunyai kecenderungan untuk mendekati perempuan dan mempunyai rasa cinta kepada mereka, maka *khuntsa* tersebut dihukumi

sebagai laki-laki. Sebaliknya jika payudaranya tumbuh dan montok, dan mempunyai kecenderungan dan rasa cinta kepada laki-laki, maka dapat ditetapkan sebagai perempuan bagi dirinya.

c. Melihat Cara Keluarnya air *Sperma* (Air Mani)

Apabila *sperma khuntsa* keluar dari alat kelamin lelaki, berarti status hukumnya lelaki dan bila keluar dari vagina berarti statusnya perempuan. Jika keluarnya berubah-ubah, kadang dari alat kelamin laki-laki dan kadang-kadang dari alat kelamin perempuan, maka dikategorikan sebagai *khuntsa musykil*.

d. Melihat Cara Keluar Darah *Mentruasi* (*Haidh*)

Apabila seorang *khuntsat* ternyata mengeluarkan darah *haidh* dari kemaluannya, maka dikategorikan perempuan, karena laki-laki tidak akan keluar darah *haidh* dari kemaluannya. Jika ia mengeluarkan darah *haidh* dari vagina, tetapi dia mengeluarkan kencing dari alat kelamin laki-laki, maka dalam hal ini dikategorikan sebagai *khunsa musykil*.

e. Melihat kehamilan dan kelahiran

Apabila seorang *khunsa* ternyata didapatkan hamil dan bahkan melahirkan keturunan,, maka dihukumi

sebagai perempuan, karena sepanjang sejarah bahwa laki-laki tidak pernah mengalami kehamilan ¹⁷⁶

Pendapat lain yang mengemuka seperti: Syekh Al-Imam Muwafiq Ad-din dalam kitab *Al-Mughni Wal-Sarkhul kabir* mengatakan:

“Jika *khutsa* tersebut tergolong *musykil* (tidak terdeteksi) dan tidak terdapat padanya tanda-tanda apakah laki-laki atau wanita, maka Ulama seperti Al-Kharqi berkata, keputusannya kembali kepada pengakuannya. Jika dia mengaku bahwa dirinya laki-laki, dan dirinya merasa cenderung menyukai wanita, maka dia boleh menikahi wanita. Jika dia mengaku bahwa dirinya wanita dan dia cenderung menyukai laki-laki, maka dia dinikahkan dengan laki-laki. Karena kesimpulan seperti itu tidak mungkin dapat diraih kecuali dari dirinya sendiri dan tidak ada jawaban yang dapat memuaskan jika bersumber dari selainnya. Maka pengakuannya diterima, sebagaimana diterimanya pengakuan seorang wanita tentang haidnya dan masa iddahnya. Sedangkan dia telah memperkenalkan dirinya bahwa dia cenderung menyukai salah satu dari kedua jenis dan memiliki syahwat kepadanya.

¹⁷⁶. Ibnu Al-Hamam, *Fathu Al-Qadir*, Juz 10, h. 515-516

Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan naluri kepada hewan jantan menyukai hewan betina dan memiliki kecenderungan kepadanya. Kecenderungan ini terdapat di dalam jiwa dan syahwat, tidak dapat ketahui oleh selainnya. Sedangkan kita tidak dapat mengenal tanda-tandanya secara zahir. Maka urusannya dikembalikan dengan perkara batin yang khusus dengan hukumnya”.¹⁷⁷

Muhammad. Quraish Shihab mengemukakan pendapatnya yang tertuang dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama* bahwa seorang laki-laki yang memiliki dua alat kelamin, satu tersembunyi dan yang satu dapat terlihat atau tampak, misalnya yang tampak seperti alat kelamin laki-laki tetapi tidak berfungsi dan tidak juga menghasilkan sperma, disisi lain, yang bersangkutan tidak memiliki kecenderungan sesuai dengan alat kelamin yang tidak berfungsi itu, bahkan sebaliknya maka, pada dasarnya lelaki tersebut adalah perempuan, apabila melakukan operasi pergantian kelamin dapat dibenarkan bila

¹⁷⁷. As-syekh Al-Imam Muwafiq Ad-din Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘Ala muhtasor Al-Imam Abi Qosim Umar bin Khusain bin Abdulloh bin Ahmad Al-Khorqi, *Al-Mughni Wal-Sarkhul kabir ‘Ala matni al-muqni’ fi-fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal lil-Imamaini Muwaffiqiddin wa-Samsiddin ibni Qudamah*, Juz VII, Darul fikr, h. 619

dilakukan untuk memperjelas alat kelamin yang berfungsi tersebut.¹⁷⁸ Bukankah yang dideritanya itu adalah penyakit, sedangkan Rasulullah Saw sendiri, memerintahkan yang sakit untuk berobat, termasuk dalam hal ini operasi kelamin. Adapun jika operasi pergantian kelamin itu sekedar mengikuti keinginan, atau dinilai tidak perlu oleh tim dokter terpercaya maka agama tidak membenarkannya.¹⁷⁹

Abu Yahya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawidalam kitab *Al-Majmu'* menjelaskan bahwa *khuntsa* yang masuk katagori laki-laki dan yang masuk katagori perempuan, penjelasannya sebagai berikut:

- 1) *Khuntsa* yang dihukumi (digolongkan) perempuan
 - a) *Khuntsa* yang memiliki satu alat (berbentuk lobang), namun setelah *baligh* dia keluar *haidl* atau hamil
 - b) *Khuntsa* yang memiliki satu alat (berbentuk lobang), tidak *haidl* dan tidak hamil, namun ada perasaan senang (*mail*) pada laki-laki
 - c) *Khuntsa* yang memiliki satu alat (berbentuk lobang), tidak *haidl*/hamil dan ada perasaan senang (*mail*)

¹⁷⁸. M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwaSeputar Wawasan Agama*, Bandung : Mizan, 1999, h. 42

¹⁷⁹. *Ibid*,h43.

pada keduanya, namun sifat kewanitaannya lebih menonjol dibanding sifat lelaki

- d) *Khuntsa* yang memiliki dua alat, namun mengalami *haidl*, keluar mani, kencing dari *vaginanya*
- e) *Khuntsa* yang memiliki dua alat, keluar kencing/mani dari keduanya namun keluar dulu dari *vaginanya*
- f) *Khuntsa* yang memiliki dua alat, keluar kencing bersamaan dari dua kelamin, namun ada perasaan senang pada laki-laki
- g) *Khuntsa* yang memiliki dua alat, keluar kencing bersamaan, ada perasaan senang pada laki-laki dan perempuan, namun sifat wanita lebih menonjol dari pria¹⁸⁰

2.) Yang dihukumi (digolongkan) pria

- a) *Khuntsa* yang memiliki satu alat (berbentuk lobang), tidak *haidl* dan tidak hamil, namun ada perasaan senang (*mail*) pada wanita
- b) *Khuntsa* yang memiliki satu alat (berbentuk lobang), tidak *haidl*/hamil dan ada perasaan senang (*mail*)

¹⁸⁰. *As'adul Rofiq*, Al-Hidayah, Surabaya, Juz II, h. 120

pada keduanya, namun sifat lelaki-lakiannya lebih menonjol dibanding sifat wanita

- c) *Khuntsa* yang memiliki dua alat, namun keluar mani, kencing dari *penisnya*
- d) *Khuntsa* yang memiliki dua alat, keluar kencing/mani dari keduanya namun keluar dulu dari *penisnya*
- e) *Khuntsa* yang memiliki dua alat, keluar kencing bersamaan dari dua kelamin, namun ada perasaan senang pada wanita
- f) *Khuntsa* yang memiliki dua alat, keluar kencing bersamaan, ada perasaan senang pada laki-laki dan perempuan, namun sifat lelaki-lakiannya lebih menonjol dari wanita.¹⁸¹

Abu bakar bin Abdurrahman As-sibti dalam kitab, *Syarah Kasyifatus saja* karangan As-Syekh Imam Al-Alim Al-fadhil Abi Abdil Mu'thi Muhammad Nawawi Al-Jawi mengatakan:

khuntsa ialah orang yang mempunyai *zakar* dan *farji*, dan untuk mengetahui statatusnya ialah dengan melihat dari mana

¹⁸¹.Abu Yahya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Pustaka Azzam, h. 50

dia kencing, apabila dia mengeluarkan air kencing dari *zakarnya* maka dia dihukumi laki-laki, dan apabila dia mengeluarkan air kencing dari *farjinya* maka dia dihukumi perempuan. Apabila air kencing tersebut keluar dari keduanya maka Imam Ibnu Sobah dan Al-Makhamili berkata, untuk menentukan status tersebut maka dilihat dari mana air kencing keluar terlebih dahulu. Apabila keluarnya lebih dahulu dari *zakar* maka di hukumi laki-laki, dan apabila keluarnya pertamanya dari *farji* maka di hukumi perempuan. Apabila keluarnya bersamaan maka dilihat yang berhenti terahir, apabila berhentinya yang terahir dari kelamin laki-laki maka di hukumi laki-laki, dan apabila terahir dari kelamin perempuan maka di hukumi perempuan.

.Apabila berhentinya itu secara bersamaan maka terdapat dua pendapat. Menurut *qaul* yang *asah* untuk menentukan kelaminnya tidak harus memandang mana air kencing yang keluar lebih banyak. Sedangkan pendapat kedua untuk menentuka status tersebut ialah dengan melihat maninya, hamil dan khaid, apabila dia mengeluarkan mani dari kelamin laki-laki maka di hukumi laki-laki, apabila keluar mani tersebut dari *farji* maka di hukumi perempuan. Dan apabila dia mengeluarkan darah *khaidl* maka dia di

hukumi perempuan. Apabila dia mengeluarkan mani dari *zakarnya* dan ia mengeluarkan darah *khaidl* dari *farjinya* maka dia dikatakan *khuntsa muskil*.

Apabila dia kencing dari dari *zakarnya* dan dan *haidl* dari *farjinya* untuk menentukan statusnya apakah di lihat dari air kencingnya atau atau saling bertentangan dan keduanya gugur dan ia di tetapkan sebagai *khuntsa muskil* maka terdapat dua pendapat, pendapat yang lebih *adzhar* ialah yg kedua, sedangkan pendapat yang ketiga di kembalikan kepada ucapannya setelah ia *baligh*, dan ia di tanya dia lebih condong kemana , apabila dia berkata saya lebih condong kepada perempuan, maka dia berstatus laki-laki, begitupun sebaliknya. Setelah dia mengatakan condong kepada laki-laki maka dia tidak boleh mencabut perkataanya lagi/perkataanya tidak di terima, kecuali dia mengatakan kalau dirinya laki-laki kemudian pada suatu hari dia melahirkan anak dan ia mengatakan kalau dia perempuan, baru perkataannya di terima¹⁸²

Berpijak dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa Islam pada dasarnya tidak membiarkan seorang *khuntsa*

¹⁸². As-Syekh Imam Al-Alim Al-fadhil Abi Abdil Mu'thi Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Syarah Kasyifatus saja*, Pustaka Islamiah Indonesia, h. 89

begitu saja tanpa status, sehingga diambil langkah-langkah untuk menentukan jenis kelaminnya melalui cara-cara di atas. Jika para ulama dan ahli sudah menentukan seorang *khuntsa*, baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan, maka status tersebut berlaku baginya untuk mendapatkan hak-haknya, sekaligus dia mempunyai kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana orang laki-laki atau perempuan yang lainnya.

Berbagai pengertian serta pendapat ahli di atas, dalam pembahasan *khuntsa*, peneliti dapat mendefinisikan *khuntsa* adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Karena hal ini tidak dimiliki oleh laki-laki dan perempuan normal (pada umumnya). Jadi andaikata ada jenis ketiga dari manusia yaitu selain laki-laki dan perempuan pasti Allah menjelaskannya, oleh karena itu seorang *khuntsa* tetap harus dimasukkan dalam kategori laki-laki atau perempuan.

Berpedoman kepada pendapat dan argumen yang dikemukakan para ahli tersebut di atas, dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan dalam menentukan *khunsa*

tersebut *berkelamin* laki-laki atau perempuan, demikian juga kewajiban yang melekat pada dirinya.

BAB IV

ANALISIS

A. Hukum Perkawinan *Khuntsa*

Dalam hukum perkawinan, status perkawinan *khuntsa* sangat terkait dengan dasar hukum perkawinan itu sendiri, seperti:

1. Wajib, menikah hukumnya menjadi wajib bagi *khuntsa* jika memang *khutsa* sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan dan di khawatirkan dia akan berbuat maksiat jika tidak segera melaksanakan perkawin;
2. Sunnah (*mandub*) jika sudah mampu tetapi masih bisa menahan diri;
3. Mubah, bagi yang belum ada minat kuat serta dapat pula menahan diri dari maksiat;

4. Haram, bagi yang dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga atau bisa menyakiti pasangannya secara lahir maupun bathin karena jiwa dan perilakunya cenderung menyamai pasangannya, dan makruh bagi yang tidak punya kemauan untuk kawin;
5. Makruh, bagi orang yang tidak mempunyai hasrat, dan tidak mempunyai biaya, atau mempunyai biaya namun dirinya sudah pikun, atau sakit seperti *impoten*¹⁸³

Menurut Ulama Fikih, seperti Imam Asy-Syafi'i, perbuatan *khunsa muskil* maupun *khunsa gairu muskil* yang lebih terdorong untuk melakukan hubungan seksual dengan orang yang sejenis kecenderungan fungsi kelaminnya dengan yang dimilikinya, seperti homoseksual dan lesbian, termasuk tindak pidana dalam Islam.¹⁸⁴

Dasarnya adalah QS An-nisa' (4) ayat 15 dan 16:

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفُحْشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (النِّسَاء: ١٥)

¹⁸³.Hafizh Dasuki, "Dkk", Editor, *Ensiklopedi Islam*, Cetakan Pertama, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993, hlm. 935-936

¹⁸⁴.*Ibid*, hlm. 936

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”(QSA-nisa’ (4): 15).

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا^{١٨٥} فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا^{١٨٥} إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ١٦

“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”(QSA-nisa’ (4): 16).¹⁸⁵

Menurut hukum Islam maupun hukum positif perkawinan akan dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam hukum Islam syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya suatu perkawinan. Yang dimaksud

¹⁸⁵ .Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 104

dengan syarat perkawinan yaitu syarat-syarat bagi calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *sighot (ijab qabul)*.¹⁸⁶

Perkawinan menurut Islam mengisyaratkan calon suami adalah beragama Islam, jelas identitasnya, tidak ada halangan untuk kawin atau bukan muhrim dari calon isteri, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri) dan tidak sedang menjalankan ihram haji. Mengenai syarat-syarat calon suami ini, *Sayyid Abu Bakar* berpendapat dalam kitabnya “*I’anatut tholibin*”, yaitu:

وَشَرَطُ فِي الزَّوْجِ تَعَيُّنٌ وَعَدَمُ مَحْرَمِيَّةِ الْمَخْطُوبَةِ تَحْتَهُ وَلَوْ فِي
الْعِدَّةِ وَأَنْ لَا يَكُونَ تَحْتَهُ أَرْبَعٌ مِنَ الزَّوْجَاتِ سِوَى الْخُطُوبَةِ وَلَوْ كَانَ
بَعْضُهُنَّ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ

“Syarat suami adalah orang yang sudah tertentu, tidak ada hubunganmahram antara suami yang telah duda dengan calon isteri (bagi pria yang akan kawin lagi), tidak telah beristeri empat orang (walau salah seorang telah di talaq dan dalam keadaan iddah raj’iyah)”¹⁸⁷

¹⁸⁶. Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqhu Ala Madzhabi Al-Arba'ah*, Maktabah al-Tijarah Al-Kubra, Mesir, 1969, h. 61.

¹⁸⁷. Sayyid Abi Bakar, *I'ana at-Tholibin*, Juz III, Syirkatul Ma'arif, Bandung, hlm. 224.

Pendapat tersebut menitik beratkan pada kejelasan seorang calon suami untuk dapat menikahi calon isteri karena tidak ada larangan dalam agama. Menurut Ulama fikih pula, apabila ada *khunsa* yang kawin dengan pasangan yang tidak sejenis atau berjenis kelamin beda (dilihat dari jenis *kelaminnya* yang dominan, seperti yang terdapat pada *khunsa ghairu musykil*), maka status hukum perkawinannya sama seperti manusia biasa. Dalam arti hukum perkawinannya dihukumi sah, sebagaimana layaknya pernikahan antara laki-laki dan perempuan pada umumnya.

B. *Khuntsa* yang Boleh Menikah

Pernikahan merupakan kebutuhan *fitri* setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang sangat penting. Pernikahan juga amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah menurut Islam, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga akan terbina secara damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah akan menghiasi kehidupan

keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Nikah juga termasuk salah satu yang dianjurkan dalam syari'at yang salah satunya bertujuan untuk melestarikan komunitas umat muslim dan memepertahankan keabadian Islam. Karena dengan jalan itulah umat Islam akan berkembang dari generasi ke generasi. Cukup banyak teks keagamaan (dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw) yang mengandung anjuran kepada kaum muslim secara langsung ataupun tidak langsung untuk melakukan pernikahan dan membangun keluarga yang sehat lahir batin

Secara konkrit, Al-Qur'an menganjurkan kepada umat Islam untuk mengikat tali pernikahan dengan wanita-wanita yang sesuai dengan hasrat serta keinginan masing-masing. Prinsip semacam ini sangat diperlukan, mengingat begitu pentingnya keserasian, cinta kasih dan saling pengertian antara kedua mempelai dan meraih kebahagiaan di kemudian hari. Jadi jelaslah, bahwasanya pernikahan dalam pandangan Islam sangatlah penting dan sangat dianjurkan bagi para pemeluk agama Islam untuk melaksanakannya.

Nabi Muhammad Saw. Telah memberikan teladan akan begitu besar manfaat yang bisa dipetik dari pernikahan. Minimal

yang bisa dicapai adalah terjaga dari hubungan zina serta terhindar dari perbuatan maksiat. Sehingga Nabi Saw. menganjurkan umatnya untuk menikah, diantara hadis rasullullah tersebut adalah::

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ زُرَّارَةٌ, حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ, عَنْ الْأَعْمَشِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ, قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنَى. فَخَلَّاهُ عُثْمَانُ. فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ أَنْ أَرْوِجَكَ جَارِيَةً بَكْرًا تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذَا, أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ. فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ, لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

“Diceritakan kepada kami, Abdullah bin ‘Amir bin Zurarah, menbceritakan kepada kami ‘Aliy bin Mus-hir dari Al-A’masy, dari Ibrahim, dari ‘Alqamah bin Qais, dia berkata: Adalah saya bersama ‘Abdullah bin Mas’ud berada di Mina, lalu ‘Utsman berkumpul bersama dia dalam berkhawat (tempat tersendiri) lalu aku duduk

berdekatan dengan dia. Utsman berkata kepadanya: “Apakah kamu mau saya kawinkan dengan seorang wanita gadis yang dapat mengingatkan sebagian urusanmu yang telah berlalu?”. Maka ketika Abdullah melihat, bahwa dia tidak mempunyai hajat selain ini, maka ia memberi isyarat kepadaku dengan tangannya. Lalu aku datang, dan ia mengatakan: “sungguh jikalau kamu mengatakan demikian, sungguh Rasulullah Saw. Pernah bersabda “Hai para pemuda! Barang siapa yang mampu beristeri, hendaklah ia kawin; karena perkawinan itu berpengaruh besar untuk menundukkan mata dan tangguh menjaga alat pital. Barang siapa yang tak sanggup kawin, hendaklah ia berpuasa, maka sesungguhnya puasa, bagi farji, adalah peredam syahwat (HR. Ibn Majah)”.¹⁸⁸

Pernikahan yang ideal yaitu pernikahan harus memenuhi *rukun* dan syarat sah pernikahan.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Islam menjelaskan bahwa *syarat* dan *rukun* perkawinan secara tegas, yaitu adanya kedua mempelai, wali, dua orang saksi, dan *ijab qabul*. Sedangkan mengenai *syarat* perkawinan disebutkan bahwa antara kedua calon mempelai telah

¹⁸⁸ . Abu Adullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Loc.Cit.*

saling rela dan ridho, antara keduanya tidak ada larangan perkawinan, antara keduanya tidak berbeda agama, calon isteri tidak menjadi isteri orang lain dan tidak menjalani masa *iddah*, antara keduanya tidak menjalani ihram. Sedangkan dalam permasalahan menjadi wali, disyaratkan laki-laki, *baligh*, waras akal, adil, tidak dipaksa dan tidak dalam keadaan ihram.¹⁸⁹ Sedangkan bagi dua orang saksi disyaratkan laki-laki, *baligh*, waras akal, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas tidak dipaksa dan memahami bahasa yang di pergunakan untuk *ijab qabul*.

Mengenai hal ini, para *fuqahaseperti* Malik, Syafi'i dan Hanbali menetapkan bahwa saksi dalam nikah minimal ulullah dua orang saksi, hal ini berdasarkan Hadis Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (رَوَاهُ ابْنُ
 مَاجَه)

“Dari ‘Abi buraidah bin Abi Musa dari ayahnya berkata:”Rasulullah Sallallohu Alaihi Wasallam bersabda: tidak

¹⁸⁹ . Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Loc.cit.*

sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil”. (HR. Ibnu Majah)¹⁹⁰

Selainsyarat perkawinan yang tersebut di atas, bahwa *syarat* sahnya perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan haruslah jelas sifat prianya dan jelas sifat perempuannya. sehingga tidak sah menikah dengan *khunsa musykil* (orang yang belum jelas status pria atau wanitanya).

Perkawinan *khunsa* tidak diatur dalam Undang-undang perkawinan, sehingga hal ini merupakan masalah tersendiri yang begitu menarik untuk diperbincangkan, dan juga merupakan masalah yang rumit disatukan dengan satu kata mengenai hukumnya. Betapa tidak, mengenai hal ini (perkawinan *khunsa*) tidak pernah dijelaskan secara rinci di dalam Al-qur'an maupun As-sunnah, melainkan hanya disebutkan di dalam *sabda* Rasulullah Sawyang tersebut di atas.

Ketentuan global dari Hadis tersebut menjadikan para Ulama fikih terdahulu tidak sembarangan untuk mencetuskan hukum yang hendak diberlakukan terhadap *khunsa*, terutama masalah perkawinannya. Allah menjelaskan hukum perkawinan dan

¹⁹⁰Ibnu Majah, *Loc.Cit*

hukum kewarisan orang lelaki dan perempuan sejelas-jelasnya didalam ayat Al-Qur'an maupun Hadis, sedangkan mengenai hal perkawinan *khunsa* tidak. Keberadaan orang banci atau *khunsa* adalah juga ciptaan Allah yang tidak sia-sia dan pasti ada hikmahnya, dan baru sedikit yang bisa diungkapkan oleh para ulama fiqih.

Tidak seorang pun didunia ini yang menginginkan hidupnya sedih menderita tidak sejahtera, dan tidak bahagia, baik lelaki maupun perempuan, tidak terkecuali termasuk *khunsa* yang keadaannya sudah barang tentu tidak dikehendaki olehnya. Demikian juga kedudukannya sebagai makhluk sosial dan dimuka hukum adalah sama yakni lelaki atau perempuan.

Untuk menghindari kevakuman hukum ini para sarjana hukum Islam (Ulama) berusaha dan *berijtihad* untuk mengatasi hukumnya. *Ijtihad* mereka bertitik tolak kepada ketentuan yang ada yaitu dengan mengidentikannya dengan lelaki atau perempuan.¹⁹¹ Karena status sangat mempengaruhi terhadap hukum yang terkait dengan *khunsa* terutama masalah pernikahannya, yang mana setiap manusia pada umumnya ingin

¹⁹¹ <http://abduhzulfidar.blogspot.com/2011/05/ingin-keluar-dari-gay-khunsa.html>, Akses 8 Agustus 2015

menjalankan apa yang dinamakan nikah. Sementara menurut hukum Islam maupun hukum positif perkawinan akan dianggap sah jika terpenuhi sarat-sarat yang telah ditentukan.

Abdurrahman Al-Jaziri Dalam kitab *Al-fiqhu Ala Madzahib Al-Arba'ah* mengatakan: “Dalam hukum Islam sarat-sarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya suatu perkawinan. Yang dimaksud dengan sarat perkawinan yaitu sarat-sarat bagi calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *sighot (ijab qabul)*¹⁹²

Sebagai salah satu sunnah Rasulullah Saw. dan sudah maklum bagi kebanyakan orang, apabila orang laki-laki menikah maka ia hanya boleh menikah dengan orang perempuan dan sebaliknya, orang perempuan menikahnya dengan orang laki-laki. Namun ada juga sebagian orang baik laki-laki maupun perempuan yang menikahnya dengan *khunsa* yaitu orang yang mempunyai dua jenis kelamin. Oleh karena itu muncul persoalan baru yang perlu penelitian dan kajian yang mendalam sehingga jelas bagaimanakah hukum menikah dengan *khuntsa*, yang apabila hal ini benar-benar terbukti dan terjadi di tengah masyarakat.?

¹⁹² . Abdurrahman Al-jaziri, *Al-fiqhu Ala Madzahib Al-Arba'a*, Maktabah Al- Tijarah Al-Kubra, Mesir, 1969, hlm. 61

Ulama' memberikan perincian tentang perawinan *khuntsa* sebagai berikut:

1. Untuk *khuntsa ghairu musykil* ulama' memberikan perincian hukum sebagai berikut:
 - a. Apabila *khuntsa* itu kencing dari lubang kelamin laki-laki (*dzakar/penis*), maka dia adalah dianggap laki-laki, sehingga dia hanya boleh menikah dengan perempuan.
 - b. Apabila *khuntsa* itu kencing dari lubang kelamin perempuan (*vagina*), maka dia dianggap berjenis kelamin perempuan, sehingga dia hanya boleh menikah dengan laki-laki.¹⁹³

Apabila ketentuan-ketentuan tersebut sudah terpenuhi maka bagi *khuntsa* diperbolehkan menikah dengan lawan jenisnya, karena sudah dapat di pastikan status kelaminnya, yaitu laki-laki atau perempuan. Sehingga apabila mereka melakukan perkawinan maka hukum perkawinannya dihukumi sah bila sarat dan *rukunnya* telah terpenuhi.

C. *Khuntsa* yang Tidak Boleh Menikah

¹⁹³ <http://kiss-donk.blogspot.com/2013/09/0049hukum-menikah-dengan-khunsu.html>, Akses, 8/1/2014

Dalam sebuah perkawinan seperti telah di sebutkan di atas haruslah jelas status calon kedua mempelai bagi calon mempelai pria haruslah jelas sifat laki-lakinya, demikian pula dengan calon mempelai wanita haruslah jelas sifat wanitanya, sehingga tidak sah menikah dengan *khuntsa muskil* (orang yang belum jelas status pria atau wanitanya).¹⁹⁴

Untuk *khuntsa Musykil*, ulama' memberikan hukum sebagai berikut:

1. Tidak boleh mengawinkan (menjadi wali);
2. Tidak boleh menikah, karena apabila dia menikah dengan seorang perempuan tidak menuntut kemungkinan dia adalah seorang perempuan juga, begitu juga sebaliknya apabila dia menikah dengan seorang laki-laki tidak menuntut kemungkinan dia adalah seorang laki-laki juga, sehingga pernikahannya dianggap batal;
3. Boleh menikah, apabila telah ada kejelasan status dari jenis kelaminnya.¹⁹⁵

Abu Yahya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawidalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengatakan sebagai berikut:

¹⁹⁴ . Ibrohim Al-Bajuri, *Op.Cit*, hlm. 100-101

¹⁹⁵.<http://kiss-donk.blogspot.com/2013/09/0049hukum-menikah-dengan-khunsu.html>, Akses, 8/1/2014

فَصْلٌ: الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ: وَهُوَ الَّذِي لَهُ ذَكَرٌ وَ فَرْجٌ امْرَأَةً, وَلَيْسَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ رَجُلًا وَامْرَأَةً. وَحَدَّدَ الشَّافِعِيُّ نَوْعَهُ فَقَالَ: "وَإِنْ كَانَ خُنْثَى يَبُولُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ الرَّجُلُ فَهُوَ رَجُلٌ يُزَوِّجُ امْرَأَةً, وَإِنْ كَانَتْ تَبُولُ مِنْ حَيْثُ تَبُولُ الْمَرْأَةُ, فَهِيَ امْرَأَةٌ تَتَزَوَّجُ رَجُلًا, وَإِنْ كَانَ خُنْثَى مُشْكِلًا لَمْ يُزَوِّجْ, "فَإِذَا كَانَ مُشْكِلًا لَمْ يَجْزَ أَنْ يُزَوِّجَ لِأَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً, وَإِنْ تَزَوَّجَ رَجُلًا, لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا, وَفِي الْحَالَيْنِ يَكُونُ النِّكَاحُ بَاطِلًا

“*Khuntsa muskil*, ialah orang yang mempunyai kelamin laki-laki dan perempuan, dan di mungkinkan dia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam As-Syafi’i memberikan perinciannya sebagai berikut: bila khuntsa itu kencing dari lubang kelamin perempuan (vagina), maka dia dianggap berjenis kelamin perempuan, sehingga dia hanya boleh menikah dengan laki-laki. Dan apabila dia khuntsa muskil, maka tidak boleh menikah, karena apabila dia menikah dengan seorang perempuan tidak menuntut kemungkinan dia adalah seorang perempuan juga, begitu juga sebaliknya apabila dia menikah dengan seorang laki-laki tidak menuntut kemungkinan dia adalah seorang laki-laki juga, sehingga pernikahannya dianggap batal”.¹⁹⁶

¹⁹⁶ . Abu Yahya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi, *Al-Majmu’Syarah Al-Muhadzab* juz 14, hal. 375

Ibnu Muflih berkata dalam kitabnya yang berjudul *Al-Furu'* dan beliau bermadzhab Hanbali: “*Tidak sah pernikahan khuntsa musykil sampai jelas keadaannya*”¹⁹⁷

Syekh Usaimin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab *Syarhul Mumti' Ala Zadil Mustaqni* berkata: Bagi seseorang yang menikah dan ternyata dia mendapati pasangannya adalah seorang *khunsa wadhih* yaitu yang telah telah jelas kelaminnya akan tetapi terdapat alat kelamin yang lain, misalkan seorang pria yang menikahi seorang wanita (dalam prasangkanya), akan tetapi ternyata dia telah menikahi *khunsa Wadhih* yang telah jelas bahwa dia wanita akan tetapi selain memiliki vagina juga memiliki penis maka nikahnya batal, karena seseorang tentunya ketika menikah dia menyangka bahwa wanita tersebut adalah wanita tulen pada umumnya, atau pria tulen sehingga apabila dia mendapatinya berbeda, maka pernikahannya batal karena ini termasuk aib yang membatalkan pernikahan. Berbeda halnya ketika memang sejak sebelum pernikahan, dia

¹⁹⁷. Muhammad ibn Muflih ibn Muhammad ibn Mufarrij Al Maqdisi Ar Raimani As Shalihi, *Al-Furu'* Juz VII, hlm. 258

telah mengetahui bahwa calon pasangannya adalah seorang *Khunsa Wadhih*¹⁹⁸

Bagi *khunsa musykil*, karena terlarang untuk menikah sampai jelas keadaannya maka apabila dia sudah memiliki syahwat disunnahkan baginya untuk berpuasa, dan boleh bagi dia untuk menggunakan obat-obatan yang akan membantu dia menurunkan hawa nafsunya, dan ini lebih ringan daripada dikatakan kepadanya untuk mengeluarkan spermanya dengan cara yang tidak boleh secara syar'i¹⁹⁹.

Berangkat dari paparan di atas, maka dapat di tarik benang merahnya bahwa, apabila *khunsa* hendak melakukan perkawinan maka haruslah jelas dulu status kelaminnya, karena hal ini akan menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan itu sendiri. Apabila statusnya belum jelas maka *khunsa* tidak diperbolehkan menikah. karena apabila dia menikah dengan seorang perempuan tidak menutup kemungkinan dia adalah seorang perempuan juga, begitu juga sebaliknya apabila dia menikah dengan seorang laki-laki tidak menutup kemungkinan dia adalah seorang laki-laki

¹⁹⁸ . Syekh Usaimin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarhul Mumti' Ala Zadil Mustaqni*, Juz 12, **Penerbit**, Darus Sunnah, hlm, 160-161

¹⁹⁹ . *Ibid*, 160-161

juga, sehingga pernikahannya dianggap batal. Apabila status *khunsa* sudah jelas, seperti berstatus kelamin laki-laki atau berstatus kelamin perempuan maka sudah dapat dipastikan *keabsahan* perkawinannya menurut Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak dari pembahasan, penyajian dan analisis di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dikatakan *khunsa* yang apabila seseorang itu memiliki dua alat kelamin (kelamin ganda), yakni memiliki kelamin laki-laki dan kelamin perempuan (*penis* maupun *vagina*), sama adakah keduanya sama besar atau kecilnya, atau sama sekali tidak memiliki kemaluan yang tampak pada tubuhnya, sehingga sulit diketahui dengan kasat mata apakah dia berjenis kelamin laki-laki ataukah kelamin perempuan. Oleh karenanya para Ulama menetapkan status hukumnya dengan cara melihat air kencing (air seni) yang keluar dari orang tersebut melalui *penis* ataukah melalui *vagina*, sehingga dapat ditetapkan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan;
2. Terhadap *khuntsayang* memiliki pertanda khusus sebagai sinyal jati diri seseorang, seperti berkumis atau berjenggot, mengeluarkan air sperma serta mempunyai kecenderungan mendekati perempuan, maka *khunsa* tersebut ditetapkan sebagai laki-laki; Sebaliknya jika memiliki pertanda payudaranya tumbuh dan montok, mengeluarkan darah *haidh* dari *vagina*, tampak hamil dan melahirkan,

serta mempunyai kecenderungan cinta kepada laki-laki, maka dia dihukumkan sebagai perempuan

3. Bila air seni dan sperma *khunsaitu* keluar dari alat kelamin yang berubah-ubah, terkadang dari alat kelamin laki-laki dan terkadang dari alat kelamin perempuan, maka dikatagorikan sebagai *khuntsa musykil*; seperti ia mengeluarkan darah *haidh* dari *vagina*, tetapi mengeluarkan kencing dari kelamin laki-laki, maka dihukumi sebagai *khuntsa musykil*;
4. .Ulama sepakat bahwa di dalam menentukan status *khuntsa*, indikasi fisiklah yang dipedomani, bukan gejala-gejala *psikis* (kejiwaannya).Sedangkan masalah perkawinan *khuntsa*, Ulama sepakat memberikan perincian tentang *khuntsa*; yakni apabila status *khuntsa* sudah jelas, maka hukum perkawinannya di hukumi sah, dan apabila statusnya belum jelas maka hukumnya tidak sah, karena dimungkinkan ia menikah sesama jenis, yang tidak menimbulkan kemaslahatan bagi keduanya.

B. Saran

1. Untuk menetapkan status hukum keberadaan khunsa, dipandang perlu kecermatan dari berbagai pihak, baik dari ahli fiqh (agama), ahli medis maupun dari segi psikologis;

2. Agar ada payung hukum dalam menetapkan status hukum keberadaan khunsa, baik dalam bidang perkawinan, maupun bidang kewarisan, dipandang layak untuk dapat diatur dalam pasal tersendiri dalam UU perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman bin Ahmad al-lji, *Syarah al-'Adhl ala Mukhtashar al-Muntaha*, Juz 2, ttp. al-Amiriyah, tt,
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid 4, Pustaka Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996,
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Khitbah, Nikah, dan Talak),(Jakarta: Amzah, 2009)

Abdul hamid Hakim, *Mabâdi' Awwaliyah*, juz I, Bulan Bintang, Jakarta, 1976,

Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufaṣṣal fî ahkâmi al-mar`ah wa al-bait al-muslim fî al-Syari'ah al-islamiyah*, Jilid VIII: Muassasah Risalah Beirut,

, Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005,

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010,

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004,

Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibi Al-Arba'ah*, Darul Hadis Al-Qahira, Juz 4,

-----, *Al-fiqhu Ala Madzhabi Al-Arba'ah*, Maktabah al-Tijarah Al-Kubra, Mesir, 1969,

Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah. *Al-Mughni*, cet.1, Beirut, Dâr al-Fikr, 1404/1984, VII,

Abi Zakariya Yahya al-Nawawi, edisi Syaikh 'Adil Ahmad Abd al-Maujud, *Rauḍahat-Ṭâlibîn*, cat.I, Beirut, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1412/1992,

Abu as-Sa'âdât ibn A'sir, *Jâmi'u al-Uṣul min Ahâdîs ar-Rasûl*, Juz I, Multaqa ahlu al- hadis,

Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayah al-Akhyar*,

Abu Yahya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi, *Al-Majmu 'Syarah Al-Muhadzab* juz 14, Pustaka Azzam,

Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Sumbangsih, Yogyakarta, 1974,

Ahmad Multazam, *Batalnya Perkawinan dan Larangan Pernikahan*, Blogspot.Com/2013/12/Batalnya-Perkawinan-Dan-Larangan.Html, Akses, 06 Feb 2015

Ahmad Qorib, *Uşul Fikih 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet. II),

Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya:Gita Media Press, 2006)

Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawwir, 1984),

Al Bukhary 52, ; Muslim 17,

Al- Syatiby, *al-Muafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.),

Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjemah: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992),

Ali Misykini, *Mushthalahât al-Fiqh*,

Alinis Ilyas, *Metodelogi Penelitian*, Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung, 2003,

Al-Syatibi, *al-Muwafaqât fie Uşûl al-Syari'ah*. (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), jilid 2,

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009),

-----, *Uşul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2011,

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

As'adul Rofiq, Al-Hidayah, Surabaya, Juz II,

Asafri Jaya dalam kitab *lisân al-'Arab* kepunyaan Ibnu Mansur al-Afriqi, (Bairut: Dâr al-Sadr, t.th), VIII,

Abi Muhammad bin Qudamah 'Ala muhtasor Al-Imam Abi Qosim Umar bin Khusain bin Abdulloh bin Ahmad Al-Khorqi, *Al-Mughni Wal-Sarkhul kabir 'Ala matni al-muqni' fi-fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal lil-Imamaini Muwaffiqiddin wa-Samsiddin ibni Qudamah*, Juz VII, Darul fikr,

As-Syekh Imam Al-Alim Al-fadhil Abi Abdil Mu'thi Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Syarah Kasyifatussaja*, Pustaka Islamiah Indonesia,

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, bandung, 1998,

Bruggink, J.J.H. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*. Alih Bahasa oleh B. Arief Sidharta. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000,

Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, Cet.1, Akademika Presindo, Jakarta, 2000,

Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

Dirjen Bimas Islam, Direktorat Uraih dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010,

Dja'far Abdul Muchit, *Problema Hukum Waria dan Operasi Kelamin*,

Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama Semarang, Cet. I, 1993, *Fathi al-daraini, al-manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihadi bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadist, 1975),

Fathul Mu'in Bisarkhi Qurrotul 'Ain, Bilma'na 'Ala Fesanteren,

Fathurrahman Djamil, *Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuennya Terhadap Anak dan Harta*, Jakarta, GT2 dan GG Pas, Mei 2007,

Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994),

Georges, *Mu'jam al-Mushthalahât al-Fiqhiyah wa al-Qânuniyah*,

Hafizh Dasuki, “Dkk”, Editor, *Ensiklopedi Islam*, Cetakan Pertama, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993

-----, “dkk”, *Ensiklopedi Islam*, Cetakan Pertama, Jilid 3 dan 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993,

Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadis 5*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003),

-----, *Fihul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta : 1974,

-----, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967,

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977, h. 70

<http://b.domaindlx.com/./data informasi.htm>, diakses 20 Oktober 2014

<http://abduhzulfidar.blogspot.com/2011/05/ingin-keluar-dari-gay-khuntsa.html>, Akses 8 Agustus 2015

<http://kiss-donk.blogspot.com/2013/09/0049hukum-menikah-dengan-khunsu.html>, Akses, 8/1/2014

<http://kiss-donk.blogspot.com/2013/09/0049hukum-menikah-dengan-khunsu.html>, Akses, 8/1/2014

<http://mbainayah.blogspot.com/2014/11/fasakh-lian-ila-dan-dzihar.html>, Akses 18 feb 2015

Huzaemah Tahido Yanggo, *Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam*, Jakarta GT2 dan GG Pas,

-----, *Masail Fiqhiyah*, Angkasa, Bandung, 2005.

Ibn Qayyim, *I'lam al-Muaqi'in Rabb al- 'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jayl, t.t.), Jilid III

Ibnu Al-Hamam, *Fathu Al-Qadir*, Juz 10, h. 515-516

Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, (Kairo: Darul Ma'arif),

Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Kairo: Daar al-Hadis, 1425 H/2004 M), juz IX

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Beirut, Dâr al- Fikr, tt, juz.2,

Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th),

Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣahih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, tth),

Imam Al-Fadhil Abi Abdi Al-Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Syarah Kasyifatussaja Ala Safinatun-naja Fi Usuliddin Wal-Fiqh*, Pustaka Islamiah Indonesia,

Imam An-Nawâwi, *Ṣahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011),

-----, Imam Nawawi, *Al Muhadzdzab*, juz 2 (Maktabah Syamilah)

Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Bab La Nikah Illa Biwaliy, Juz V, Aplikasi Maktabah Syamilah,

Imam Khomeini, *Tahrir al-Wasilah*, jil. 2,

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, Gaung Persada Press, 2008,

Izzuddin Ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Bairut: Dar al-Jail, t.t), jilid II,

Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuthi, *Al-Jami' As-Shoghir*, Maktabah Darul Ihya' Kutub Al-arabiah, Juz I,

Jalaluddin as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazāir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt),

-----, *Jamî'u al-Hadis*, al-Mausu'ah al-arabiyah,

James H. Donnelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, *Fundamentals of Management*, (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998).

Jess; Gregory J. Feist (2010). *Teori Kepribadian: Theories of Personality*. [Salemba Humanika](#).

Jiko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori & Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011,

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1990,

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, ACAdemia, Tazaza, Yogyakarta, 2009,

-----, Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan 1*, ACAdemia, Tazaza, Yogyakarta, 2004,

-----, *Hukum Perkawinan 1*, ACAdemia, Yogyakarta, 2005,

Kitâb al-Irts; Ali Akbar Dekhada, jil. 7,

Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1981,
Kompilasi Hukum Islam,

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung, 1989,

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991),

Louis Gootshalk, *Understanding Historya Primer of Historical Method*, terjemah: Nongroho Noto Susanto, (Jakarta, UI Press, 1985),

Lu-lu-u wal Marjân 2,

M. Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994),

- M. Fahim Khan, *Shatibi's Objectives of Shari'ah and Some Implications for Consumer Theory*, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed), *Reading in Islamic Economic Thought*.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002,
- M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama*, Bandung : Mizan, 1999,
- , *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.k6, Mizan, Bandung, 1997
- Mahdi Hadawi Tehrani, *Majmu'e Maqâlât-e wa Guftâr-e, Duwwumin Seminar Didgâh-ha-ye Islâm dar Pezesyk*, jil. 2,
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta : Haji Masagung, 1982,
- Moh, Yasir Alami, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial dari Wacana Bangsa hingga Wacana Agama*, Yogyakarta : Lkis, 2004, Prolog,
- Moh. Mukri, *Benarkah Imam Syafi'l Menolak Masalah?*, Yogyakarta: Pesantren Nawaesea Press, 2010,
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958),
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),

- Muhammad Arief, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1986,
- Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqih Praktis Menurut Al-qur'an , As-sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Mizan, Bandung, Cetakan Pertama, 2002,
- Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki, *Qawânin al-Ahkâm al-Syar'iyah*, Beirut, Dâr al-'ilm li al-Malâyîn, 1974,
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam - Syarah Bulughul Marâm*, (Jakarta: Dârus Sunnah Press, 2013),
- Muhammad Husain, Mukhtari, Muradi, Ali Asghar, *Farhang-e Ishthilahât-e Fiqh*,
- Muhammad ibn Muflih ibn Muhammad ibn Mufarrij Al Maqdisi Ar Ramaini As Shalihi, *Al-Furu'* Juz VII,
- Muhammad 'Iz ad-Din Abdul Aziz bin Abd as-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fie Maşalih al-Anam*, Juz 1, t.t.p.: al-Istiqomah, t.t.,
- Muhammad Kamaluddin Imam, *Uşulul Fiqh Al-Islamy*, (Iskandariyah: Darul Matnu'at Al Jami'ah,
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophiy*, (Islamabad; Islamic Research Institute, 1977),
- Muhammad Said Romdhon Al Buthi, *Ḍawâbitu al Maslahah fieal-Syariah al-Islamiyah*, (Muassasah Risalah),

- Mushtofa Muhammad Imarah, *Jawahiru Al-Bukhari*, Al-Hidayah, Surabaya, 1371,
- Muslich Maruzi, *Pokok -Pokok Ilmu Waris*, Pustaka Amini, Semarang, 1981,
- Nur Khoirin YD, “*Operasi kelamin dalam Perspektif Hukum Islam*”, Al-Ahkam, XV, I, April, 2004,
- Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Cet.I, STIA-LAN Press, Jakarta, 1999.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000,
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet.2, Penamadani, Jakarta, 2005,
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974),
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kecana, 2009
- Sayid Muhammad Husaini, *Farhangge Lughat wa Ishthilahât-e Fiqhi*,
- Sayyid Abi Bakar, *I’ناه at-Tholibin*, Juz III, Syirkatul Ma’arif, Bandung,
- Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid XIV, Bandung : Al-Ma’arif, 1987,
- , *Fikih Sunnah 6*, PT. Alma’arif, Bandung, 1980, .

-----, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut, Dâr al-Fikr, 1983), cet.4, jilid 2, .

-----, *Fiqh as-Sunnah*, Dar ats-Tsaqafah Al-Islamiyah, Jilid III,

Sedarmayanti dan Syarif Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung, 2002,

Slamet Abidin, dan H. Aminudin : *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999),

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998,

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2005,

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, CV. Rajawali, Jakarta, 1991,

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990,

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, penerjmh. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004,

Syaikh Kamil Muhammad ‘uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta:pustaka al-kautsar, 1998)

Syekh Usaimin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarhul Mumti’ Ala Zadil Mustaqni*, Juz 12, **Penerbit**, Darus Sunnah,

Taqiyyuddin Abi Bakr, *Kifayatul Akhyar fie Hilli Ghayah al-Ikhtishar*, Dar al-Kutub al-Islamy, tt,

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013,

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana: 2010), cet.ke-2,

UU No.1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adilatuhu*, Dar Al-Fikr, Cet II, 1985, Jilid VIII,

-----, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II,

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, PT. Tehazed, 2010

Yusuf Hamid Alim, *Al Maqâsid al 'Ammah Lie as-Syariah al-Islamiyah*, (Riyadh: Ma'had Ali Al Fikri Al Islami, Cet-2, 1994 M/1415 H) ,

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007,

-----, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,

Zainuddin bin 'Abd al-'Aziz al-Malibâri, *Fathu al-Mu'in bi Syarh Qurratu al- 'Ain* (Cirebon, al-Maktabah al-Mișrîyah, t.t,

ZainuddinHamidy, dkk, Shahih Bukhari, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid IV, Widjaya, Jakarta,

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* Jilid II, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995),



BIODATA PENULIS

Khoirul Abror, lahir di Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak, Tanggamus, Lampung, Tanggal 03 April 1957 yang sekarang ber-domisili di Bandar Lampung.

Setelah menamatkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Putihdoh Tahun 1970, pendidikan dilanjutkan pada Pondok Pesantren YMPI (Yayasan Majelis Pelajar Islam) dan memperoleh ijazah pondok (swasta); setelah terhenti selama 3 tahun, pada tahun 1976 memperoleh ijazah Tsanawiyah Negeri melalui ujian persamaan. Kemudian melanjutkan ke Madrasah ‘Aliyah Negeri (Ex. SP.IAIN) memperoleh ijazah Negeri Tahun 1979.

Pada tahun 1979 itu juga menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa pada Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, dan memperoleh ijazah Sarjana Muda (BA). Tahun 1983, melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi yang sama di IAIN Raden Intan Bandar Lampung, dan memperoleh ijazah Doktorandus (Drs) Tahun 1986. Menyelesaikan program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung (UNILA) tahun 2003. Saat ini sedang menempuh program Doktor Prodi Hukum Keluarga.

Aktivitas dibidang pendidikan dimulai sebagai Asisten Dosen Luar Biasa pada Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung sejak Tahun 1984-1987; Pada tahun 1988 diangkat sebagai Dosen tetap pada Perguruan Tinggi yang sama dalam mata kuliah Fiqh Ibadah sampai sekarang dengan pangkat Pembina/ Lektor Kepala (IV/c).

Karya ilmiah yang telah dikerjakan antara lain: Sebab-sebab Hapusnya Hukuman menurut KUHP dan Hukum Islam (Skripsi Sarjana Muda), Recidive Pencurian Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Skripsi Sarjana). Perkawinan antar Agama (Penelitian

Kolektif); Klinik Tradisional dalam Upaya Menghimpun Tenaga kerja Wanita, Studi Kasus pada Panti Pijat di Sepanjang Jalan Yos Sudarso Kecamatan Teluk Betung Selatan (Penelitian Individu) yang diterbitkan oleh seksi penerbitan Fakultas Syari'ah., Antisipasi dan Solusi kekerasan Massa, studi di wilayah Hukum Poltabes Bandar Lampung (Penelitian Individu Tahun 2003 ISBN No. 979-3161-42-6. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Per-kosaan (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung-karang) Penelitian individu (Tesis S2) tahun 2003. Buku Dak-wah Pembangunan ISBN No. 979-3161-40-3. Dan buku ajar Fiqh Munakahat, yang diterbitkan oleh seksi Penerbitan Fakul-tas Syari'ah IAIN Raden Intan, tahun 2009. juga Buku Fiqh Ibadah (Edisi Revisi) tahun 2014, dengan ISBN 979-3161-00-0.; Terobosan bagi Pondok Pesantren dalam upaya Pengelolaan BMT dan Balai Usaha Latihan Keterampilan, makalah ilmiah yang dipro-sentasikan pada Workshop yang diselenggarakan Kanwil Kemenag Provinsi lampung di Hotel Kurnia 2; Janazah Anonim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perawatan janazah di RSUD Abdul muluk), penelitian Individu (tahun 2014) ISBN no.978-602-717-081-0; Buku ajar Hukum Perkawinan dan Perceraian (tahun 2015), yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan, ISBN No. 978-602-10-6783-3.

Juga sering membuat artikel di Media Cetak; Koran dan majalah ilmiah lain yang telah terakreditasi.



Laporan Hasil Penelitian Individu

